

**KEBIJAKAN POLITIK GUBERNUR ALEX NOERDIN DAN  
GUBERNUR HERMAN DERU DALAM PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Politik**

**Oleh :**

**Sahuda**

**1657020159**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 1442 H / 2020 M**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**UJIAN MUNAQOSAH**

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Sahuda, NIM. 1657020159 yang berjudul *Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penganggulan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 01 Januari 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Kun Budianto, M.Si**  
NIP. 197612072007011010

**Pembimbing II**



**Erik Darmawan, M.Hi.**  
NIDN. 0217057402

## PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

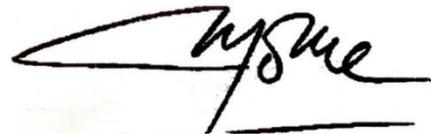
Nama : Sahuda  
NIM : 1657020159  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman  
Deru dalam Penganggulan Kebakaran Hutan dan Lahan di  
Sumatera Selatan

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 07 Januari 2021  
Tempat : Ruang Online / Daring

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Program Starata I (SI) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 07 Januari 2021  
Dekan,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A  
NIP. 19620621988031001

### TIM PENGUJI

**KETUA,**



Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI  
NIP. 197409242007012016

**SEKRETARIS,**



Ryllian Chandra Eka Viana M.A  
NIP. 198604052019031011

**PENGUJI I,**



Dr. Yenrizal, M.Si  
NIP. 197401232005011004

**PENGUJI II,**



Siti Anisyah, M.Si  
NIDN. 2012129302



**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Politik**

*Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Kode Po 30126 Telp. (0711) 35334 KM. 3,5 Palembang*

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahuda  
NIM : 1657020159  
Jurusan : Sarjana (S1) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 29 November 2020

Yang Membuat Pernyataan,



**Sahuda**

NIM. 1657020159

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan.*

*(Q.S. Al-Insyirah: 6)*

**Melius Est Acciepere Quam Facere Injuriam**

*(Lebih Baik Mengalami Ketidakadilan. Daripada melakukan Ketidakadilan)*

### **PERSEMBAHAN**

- **Kedua Orangtuaku Tersayang Yang Selalu Memberikan Dukungan, Semangat dan Doa Yang Selalu Mengiringi Langkahku**
- **Kakakku Agus ST, Ayukku Supiani, serta keluargaku tercinta**
- **Teman hatiku dan Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* serta *'inayah*-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah **“Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin Dan Gubernur Herman Deru Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sumatera Selatan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden

Fatah Palembang.

5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I skripsi saya.
6. Dr.Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang .
7. Ryllian Chandra Eka Viana, M.A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang .
8. Erik Darmawan, S.IP., M.H.I sebagai Dosen pembimbing II skripsi saya dan juga mentor yang baik mulai dari perumusan judul sampai dengan selesai skripsi.
9. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Amin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Palembang, 20 November 2020



Sahuda

## DAFTAR ISI

Cover Luar	
Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Motto Dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Abstrak .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metodologi Penelitian .....	21
1. Pendekatan/Metode Penelitian .....	22
2. Data dan Sumber Data .....	22
3. Teknik Pengumpulan Data .....	23
a. Wawancara .....	23
b. Dokumentasi .....	24
4. Teknik Analisis Data .....	25
H. Sistematika Penulisan Laporan .....	26

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Sumatera Selatan .....	27
1. Letak Geografis .....	27
2. Kependudukan.....	31
B. Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan .....	33
C. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan.....	36

D. Profil Alex Noerdin dan Herman Deru .....	37
1. Profil Alex Noerdin .....	37
a. Biografi.....	38
b. Pendidikan.....	39
c. Karir .....	40
d. Organisasi.....	40
e. Penghargaan .....	41
f. Kehidupan pribadi .....	45
g. Visi Misi.....	46
2. Profil Herman Deru .....	47
a. Biografi.....	48
b. Pendidikan.....	49
c. Karir .....	50
d. Organisasi.....	51
e. Penghargaan .....	52
f. Kehidupan pribadi .....	52
g. Visi Misi.....	54
E. Dasar Hukum .....	55

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan...57	
1. Kebijakan politik Alex Noerdin dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan .....	59
2. Kebijakan politik Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan .....	64
B. Bentuk dan Strategi Kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.....	71

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas wilayah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2018.....	28
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2017 .....	31
Tabel 2.3 Data Jumlah Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut Tahun 2019.....	35
Tabel 3.1 Data Luas Kebakaran Hutan di Sumatera Selatan (Ha).....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Data Hotspot pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	3
Gambar 3.1 Tingkat rawan areal terbakar tahun 2015 .....	58
Gambar 3.2 Peran Alex Noerdin meninjau pemadaman api sekitar JSC.....	60
Gambar 3.3 Peran Alex Noerdin minta BPBD maksimal cegah Karhutla .....	62
Gambar 3.4 Herman Deru prioritaskan pencegahan Karhutla di Sumsel .....	66
Gambar 3.5 Herman Deru serius atasi Karhutla di Sumsel .....	68

## ABSTRAK

Provinsi Sumatera Selatan termasuk ke dalam salah satu provinsi rawan kebakaran di Indonesia. Gubernur memiliki peran penting dalam kepemimpinannya terutama dalam upaya pengendalian Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah. Diantara masing-masing periode pemerintahan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru memiliki kebijakan politik masing-masing dalam upaya penanggulangan Karhutla. Peneliti harap dapat membantu memberikan penjelasan dan pemahaman lebih mengenai kebijakan politik mantan Gubernur Alex Noerdin dan gubernur Herman Deru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dengan teori kebijakan politik yang dikemukakan oleh Robert D. Behn. Penelitian ini menggunakan tipe analisis dengan pendekatan kualitatif guna untuk menganalisis upaya mantan Gubernur Alex Noerdin dan gubernur Herman Deru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Alex Noerdin yang sudah dua periode maka sudah banyak program yang di buat dengan berbagai lembaga. Gubernur Alex Noerdin lebih berfokus pada pengendalian Karhutla dengan menyusun Peraturan Gubernur dalam pengendalian Karhutla. Kemudian saat kepemimpinan Gubernur Herman Deru langsung melanjutkan program yang telah di buat dengan kegiatan utama lebih berfokus membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla selanjutnya tinggal mengevaluasi program yang ada serta menambah dana dalam mengatasi Karhutla di Sumatera Selatan. Sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori kebijakan politik tersebut dapat dilihat dari apa saja upaya yang dilakukan dari kedua gubernur sudah berhasil dilakukan sesuai dengan koordinasi antar lembaga penanganan Karhutla. Kata kunci : Kebijakan Politik, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

## **ABSTRACT**

South Sumatra Province is included in one of the fire-prone provinces in Indonesia. The governor has an important role in his leadership, especially in efforts to control forest and land fires (Karhutla) in the regions. Between each administration period, Governor Alex Noerdin and Governor Herman Deru had their respective political policies in the effort to tackle forest and land fires. Researchers hope that they can help provide more explanation and understanding of the political policies of former Governor Alex Noerdin and governor Herman Deru in tackling forest and land fires in South Sumatra with the political policy theory put forward by Robert D. Behn. This research uses the type of analysis with a qualitative approach in order to analyze the efforts of former Governor Alex Noerdin and governor Herman Deru in overcoming forest and land fires in South Sumatra. The results showed that Alex Noerdin's efforts, which have been for two periods, have created many programs with various institutions. Governor Alex Noerdin focuses more on controlling forest and land fires by drafting a Governor Regulation on controlling forest and land fires. Then when the leadership of Governor Herman Deru immediately continued the program that had been made with the main activity focusing more on forming an integrated team for forest and land fire prevention and control, then it was only necessary to evaluate the existing programs and increase funds in dealing with Karhutla in South Sumatra. In accordance with the theory used by the researcher, namely the Political Policy theory, it can be seen from what efforts made by the two governors have been successfully carried out in accordance with the coordination between agencies handling Karhutla.

Keywords: Political Policy, Forest and Land Fires

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan banyak memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, karena hutan memberikan sumber kehidupan dan manfaat yang besar. Kegiatan perlindungan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.<sup>1</sup>

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.<sup>2</sup> Hutan tersebut harus dilindungi dan harus dijaga kelestariannya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah

---

<sup>1</sup> Indra Januar Siregar, (2010), *Dampak Kebakaran dan Hutan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak*, Depok: Universitas Teknik.

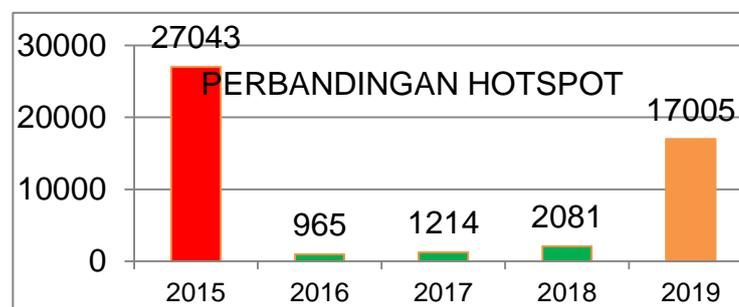
<sup>2</sup> Salim H.S., (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Indonesia beriklim tropis terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi disekitar bulan Mei sampai dengan September dan puncak kemarau biasanya terjadi pada bulan September dan Oktober, yang mengakibatkan terjadinya kemudahan kebakaran hutan dan lahan khususnya pada lahan gambut yang menimbulkan kabut asap. Selain itu perilaku masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, mengambil kayu atau mencari ikan dengan cara membakar, disamping itu juga perusahaan perkebunan nakal yang membuka lahan dengan cara mudah dan murah yaitu dengan membakar, kondisi musim kemarau yang sangat kering dan panas membuat kondisi kebakaran hutan pada wilayah lahan gambut menjadi tidak terkendali dan mudah menyebar kemana-mana sehingga menimbulkan kebakaran yang sangat parah.

Kebakaran hutan dan lahan yang besar dan tidak terkendali mengakibatkan terjadinya kabut asap yang cukup pekat. Kabut asap yang cukup pekat tersebut mengakibatkan terganggunya jalur transportasi udara, laut dan darat dan yang lebih parah dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yaitu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan tingkat Indeks Pencemaran Udara (ISPU) yang buruk. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan hutan dan atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan titik hotspot kebakaran hutan dan lahan tahun 2018 mulai terjadi pada bulan Agustus dan puncaknya pada bulan September, tetapi berdasarkan pantauan satelit tidak terjadi sebaran asap di wilayah Sumatera Selatan pada musim kemarau tahun 2018. Diberitakan sebelumnya bahwa tahun 2019 kebakaran makin parah menyebabkan keadaan kota tebal akan kabut asap sampai sekolah meliburkan siswa-siswanya.



**Grafik 1.1 Perbandingan data hotspot pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019**

**Sumber : BPBD Sumsel Tahun 2019**

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan dari 2015-2019 bahwa *hotspot* terbanyak di tahun 2015 yaitu sebanyak 27043. Kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2018. Tetapi di tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 17005. Dari hal tersebut menjadi permasalahan mengapa pemerintah saat ini tidak segera melakukan pengendalian seperti yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. Mengapa titik *hotspot* api di tahun ini sangat besar hampir menyamai kebakaran hebat di tahun 2015 lalu.

Meskipun jumlah titik api di Sumsel meningkat, jumlahnya belum separah yang terjadi pada September 2015 lalu, namun lebih tinggi dibandingkan September Periode 2016-2018. Berdasarkan data BPBD

Sumsel, September 2015 terdapat 11.285 titik api. 218 titik pada 2016, 418 titik pada 2017, serta 673 titik pada 2018. Sedangkan 2019 sudah lebih dari 700 titik api. Kabupaten yang paling banyak menghasilkan titik api yakni Musi Banyuasin dengan 668 titik, 330 di OKI, 161 di OI, 152 di Banyuasin, 132 di Musi Rawas Utara, 131 di Musi Rawas, serta 101 di Muara Enim.<sup>3</sup>

Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2016 Tanggal 21 April 2016 Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan lahan dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada keseimbangan dan kelestarian serta mengamankan fungsi serta manfaat dari hutan tersebut.

Perda ini juga diatur dalam Pasal 2 mencakup 4 ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi upaya pencegahan, upaya penanggulangan, upaya penanganan dan upaya pengawasan. Yaitu upaya terpadu dalam mencegah, menanggulangi dan menangani terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Di bagian pengawasan yaitu peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran

---

<sup>3</sup> Sehari 353 Titik Api di Sumsel, Terbanyak sepanjang 2019, <https://m.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada 10 Oktober 2019

dan merusak lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pasal 3 Perda ini juga membahas tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang membakar hutan atau lahan dan pada ayat 2 pelaksanaan pembakaran hutan dan lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan seperti pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Ada perda, gubernur saat ini Herman Deru wacanakan terbitnya peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur larangan membakar hutan dan lahan. Peraturan ini pula akan mengatur apa yang menjadi kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam kebutuhan membukalahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian. Ia sedang mempersiapkan menelaah sebagaimana pembolehan pembukaan lahan yang diatur dalam peraturan yang ada selama ini. Pergub akan lebih rinci mengatur pembukaan lahan yang sesuai. Sarana prasarana yang dipersiapkan sebelum membuka lahan harus dicegah semaksimal mungkin. Lebih meningkatkan anggaran untuk pemadaman.

Dalam periode pemerintahan tentunya memiliki perbedaan dalam menangani masalah yang terjadi, terutama fokus pada cara pengendalian hutan ini. Periode Alex Noerdin menyatakan bahwa Kebakaran hutan baginya merupakan hal yang paling ditakuti terjadi di masa kepemimpinannya. Sebab, bukan hanya merugikan dengan hilangnya ratusan hektare, tetapi akan sangat

berbahaya bagi masyarakat yang terkena langsung dampak dari kebakaran, misalnya terkena ISPA akibat asap.<sup>4</sup>

Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 6 Februari 2018 di Istana Negara Jakarta bahwa Palembang akan menjadi tuan rumah Asian Games, Alex Noerdin bergerak cepat dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, yaitu melaksanakan rapat koordinasi di tingkat Provinsi, menetapkan keadaan status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, membentuk Posko Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menyebarluaskan “Maklumat” tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar serta ancaman hukuman kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, pendirian posko pemadaman dini, di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, oleh personil gabungan, maupun posko pemadaman oleh perusahaan hutan dan perkebunan, juga dilaksanakan patroli terpadu di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.<sup>5</sup>

Sedangkan periode Herman Deru untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tahun 2019, melalui kebijakan Herman Deru telah dilakukan berbagai program dan kegiatan, baik pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, maupun regulasi terhadap penggunaan atau

---

<sup>4</sup> Alex Noerdin dan kisah ‘Pukulan telak’ Kebakaran hutan, <https://m.ccnindonesia.com/nasional>, diakses tanggal 10 Oktober 2019

<sup>5</sup> Data laporan akhir BPBD Sumsel tahun 2018

tata kelola lahan, khususnya lahan gambut. Upaya kebijakan tersebut melalui pencegahan yang dilakukan mulai dengan pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi atau kampanye kepedulian terhadap lingkungan, utamanya untuk tidak membuka lahan dengan membakar, kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sumatera Selatan, Instansi vertikal terkait, serta dunia usaha yang bergerak dibidang kehutanan, perkebunan dan pertanian, termasuk TNI dan Polri sampai jajaran terendah.

Upaya lainnya adalah dengan memperkuat daerah khususnya desa-desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan agar dapat mengalokasikan dana bantuan desa untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2019, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kegiatan kesiapsiagaan dimulai dengan menetapkan status siaga darurat, berdasarkan prakiraan cuaca sudah mulai memasuki musim kemarau oleh BMKG, membuat surat edaran untuk Kabupaten/Kota yang rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan upaya pengendalian karhutla sedini mungkin, membuat dan menyebarluaskan “Maklumat” tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar serta ancaman hukuman kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Data laporan BPBD Sumsel tahun 2019

Kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan bersama yang harus dipatuhi serta mengikat bagi seluruh masyarakat. Adanya kebijakan atau aturan yang dikeluarkan dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dan keinginan tersebut. Kebijakan politik pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah ada salah satunya di Sumsel untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang efisien, maka administrasi pemerintah harus tunduk pada kontrol politik.<sup>7</sup>

Situasi dan kebijakan politik yang sedang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus diambil oleh pemerintah, dan tentunya hal itu sangat berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan, termasuk juga Peraturan Daerah. Produk yang mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Perda sebagai produk dari kebijakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses politik yang melatarbelakangi lahirnya berbagai macam idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ َ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ َ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ عُوا أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا ٨(بَصِيرًا) سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ َ بِهِ يَعِظُكُمْ ذَلِكَ َ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنَّ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنَّ َ مِنْكُمْ الْأَمْرُ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ

---

<sup>7</sup> Frank Goodnow, (1990), *Politics And Administration: A Study in Government*, New York, the Macmillan Company: London, Macmillan & co.ltd, hal 44

*“Sesungguhnya Allâh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allâh memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allâh adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allâh dan ta’atilah Rasûl(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allâh (al-Qur’an) dan Rasûl (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Q.S An-Nisâ:58-59*

Di daerah persoalan pengendalian Karhutla juga menjadi penting saat diproyeksikan dengan penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan urusan kehutanan ditarik ke provinsi kecuali kabupaten yang memiliki Daerah dimana urusan kehutanan di tingkat kabupaten ditarik ke tingkat provinsi kecuali urusan taman hutan raya. Maka gubernur memiliki peran penting dalam kepemimpinan pengendalian Karhutla di daerah. Diantara masing-masing periode pemerintahan, Gubernur diharuskan menjalankan kebijakan politik yang telah dijalankan untuk meyakinkan masyarakat dalam keberhasilannya menanggulangi kebakaran hutan yang setiap tahunnya terjadi dan titik *hotspot* meningkat tinggi pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di latar belakang maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Bentuk Strategi Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui Bentuk Strategi Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan penjelasan dan pemahaman lebih mengenai Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan wawasan untuk pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kerusakan hutan dan lahan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain terutama untuk mahasiswa jurusan ilmu politik Fisip yang akan meneliti tentang Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.

**E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian yang ada peneliti melihat pada jurnal atau skripsi terdahulu yaitu :

*Pertama, Desri Hunawan “Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”* Menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk membedah cara penyelesaian pembakaran lahan di Indonesia melalui “Jalan Pantas” yaitu cara yang sesuai dengan prosedur atau melalui “Jalan Pintas” yaitu cara

langsung menuju inti permasalahan ruang lingkup penulisan ini meliputi aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya.<sup>8</sup>

*Kedua*, Anih Sri Suryani dalam jurnal yang berjudul “*Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia*” yang mengatakan Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabut tersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk meminimalisir dampak tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif dari pemerintah daerah.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Agung Setiawan dalam jurnal yang berjudul “*Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (Agung Setiawan) Baru*” mengatakan bahwa Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memang sering terjadi di Indonesia dan khususnya terjadi pada saat musim kemarau. Pemerintah telah melakukan usaha dan berbagai upaya untuk menangani

---

<sup>8</sup> Desri Hunawan (2016). *Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas:*

<sup>9</sup> Anih Sri Suryani (2012). *Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia*

permasalahan ini dengan adanya pembuatan kebijakan atau produk hukum yang menjadi landasan sebagai langkah menangani bencana ini. Namun hal ini dianggap masih belum maksimal oleh masyarakat Indonesia karena dianggap belum kuat untuk penanganan suatu rencana yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Pengendalian yang dilakukan juga hanya lebih menggunakan upaya represif dibanding preventif sehingga dianggap tidak efektif untuk menangani permasalahan ini. Hal ini juga memiliki kekurangan karena masih bersifat sektoral saja belum mampu ke tingkat permasalahan nasional.<sup>10</sup>

*Keempat*, Kushartati Budiningsih dalam jurnal yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan*” menyatakan bahwa Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) di Indonesia terjadi hampir setiap tahun sejak 1997. Penyebab utama kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia, didorong kondisi iklim ekstrem yang dipengaruhi *El Nino* saat musim kemarau dan kondisi biofisik lahan terdegradasi. Di Indonesia kebakaran berdampak pada aspek social budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melibatkan multi institusi pemerintah dalam pengendalian Karhutla. Dengan demikian koordinasi antar institusi mutlak diperlukan dalam pengendalian Karhutla. Studi dengan pendekatan kualitatif ini menganalisis koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengendalian Karhutla dengan kasus di

---

<sup>10</sup> Agung Setiawan (2018). *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (Agung Setiawan) baru*.

Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah terjadi dalam konteks pemadaman kebakaran. Kinerja yang dihasilkan kurang optimal ditinjau dari capaian target pemadaman. Faktor yang memengaruhi koordinasi adalah kewenangan, komunikasi, kontrol dan kepemimpinan. Koordinasi perlu ditingkatkan dalam konteks pencegahan Karhutla mengingat pemadaman api di lahan gambut relatif sulit dikendalikan.<sup>11</sup>

*Kelima*, Herman Daryono dalam jurnal yang berjudul “*Potensi, Permasalahan dan Kebijakan yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa Gambut Secara Lestari*” menyatakan bahwa hutan dan lahan rawa gambut yang terdegradasi, dapat dilihat penyebab awalnya, terutama apabila hutan rawa gambut tersebut dibuka karena drainase dalam yang memotong kubah gambut ditambah eksploitasi yang telah dilakukan sehingga ekosistem hutan rawa gambut berubah. Dimusim hujan terjadi banjir dan dimusim kemarau terjadi kekeringan, gambut kering dan mudah terjadi kebakaran gambut. Rehabilitasi yang perlu dilakukan adalah rehabilitasi hidrologi terlebih dahulu dengan cara penabatan saluran/drainase dengan tujuan menghambat aliran air di saluran drainase dan diharapkan air dapat meresap membasahi kembali lahan gambut sekitar saluran drainase.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kushartati Budiningsih (2017). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan*

<sup>12</sup> Herman Daryono, *Potensi, Pemasalahan dan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 6. No. 2, Agustus 2009.

Dari penelitian terdahulu diatas, para peneliti dengan penulis terdapat perbedaan yaitu dari segi judul, literatur dan pembahasan, dimana skripsi ini lebih berfokus kepada Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori merupakan seperangkat pernyataan yang sistematis, metodis, logis dan faktual yang dimukakan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah realitas. Realitas yang terdapat pada sebuah teori merupakan pemahaman subjektif manusia yang dibuat berdasarkan fakta objektif yang tersedia. Jadi teori senantiasa didasarkan pada fakta. Tapi teori bukan sekadar kumpulan fakta yang tidak saling berhubungan melainkan fakta yang telah diorganisasikan dan diketahui keterkaitannya. Karena teori berpijak pada fakta maka sebuah teori akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan dan menganalisis suatu gejala tertentu secara faktual.

Kebijakan dan politik memiliki definisi masing-masing. Secara sederhana Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa “pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri”.<sup>13</sup> Sedangkan Menurut Miriam Budiardjo, “kebijakan (*policy*)

---

<sup>13</sup> Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 21.

adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu”.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi yang telah di sebutkan beberapa ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang berupa tindakan pejabat-pejabat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pejabat, tindakan tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan dan mengandung tujuan politik serta dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan yang dimaksud disini disepadankan dengan kata bahasa Inggris yaitu *policy* yang berbeda dengan kata kebijaksanaan.

Sedangkan pengertian politik menurut beberapa ahli, seperti Ramlan Surbakti adalah “interaksi antara pemerintahan dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”.<sup>15</sup> Menurut Andrew Heywood, “politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan–peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama”.<sup>16</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa politik adalah proses dimana kelompok-kelompok tertentu atau pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan saat

---

<sup>14</sup> Mariam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 20.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti. (1991). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hal. 1.

<sup>16</sup> Mariam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 16.

mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan agar tujuannya tercapai. Oleh karena itu, “kebijakan politik adalah suatu aturan atau tindakan dari pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat atau negaranya. Kebijakan politik merupakan strategi pokok kehidupan suatu negara atau garis besar haluan suatu negara, yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan kepada hukum”.<sup>17</sup>

Berbeda Menurut Thomas Dye dalam Subarsono, “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan James E. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”.<sup>18</sup>

Adapun dalam kerangka teori ini mengambil pengertian kebijakan politik. Dalam mengartikan kebijakan politik tidak dapat terlepas dari kebijakan publik atau *public policy*. Kebijakan politik yang dimaksud disini adalah bagian bidang dari kajian kebijakan publik. Dalam proses perumusan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, antara lain:<sup>19</sup>

- 1) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- 2) adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatifme)
- 3) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- 4) adanya pengaruh dari kelompok luar

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Anwar Arifin, (2014). *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 77.

<sup>18</sup> Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : PustakaPelajar, hal. 2

<sup>19</sup> Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press. Hal. 52

5) adanya pengaruh keadaan masa lalu

Dalam Jurnal Handbook Of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods menyatakan bahwa :

*“Benz has tired to address the challenge to consider specific policy-politics relations as well as “policy contingencies” from the perspective of an actor-centered institutionalism. According to him, the interests of policies, has to be a connected with (1) a “feasible set” given at a certain point in timen and with (2) an already existing institutional structure”.*<sup>20</sup>

Yang menjelaskan bahwa menurut Benz kepentingan aktor menentukan apa kebijakan yang seharusnya, namun kebijakan politik harus terhubung dengan 2 unsur : (1) sistem yang layak yang diberikan pada titik waktu tertentu (2) struktur kelembagaan yang sudah ada. dengan kata lain, definisi kebijakan suatu masalah menjadi subjek masalah keputusan politik dan karena itu tugas politik. Dalam jurnal Policy Analysis and Policy Politics Author (s): Robert D. Behn menyatakan bahwa :

*“The policy analyst is concerned with efficiency and outputs, and ignores sunk costs; the policy politician is concerned with distribution and inputs, and seeks to justify sunk costs. These differences, can be derived from the analyst’s indifference to constituencies and the politician’s devotion to them, says the author, who suggests several ways for policy analysts to increase their political influence. The complete policy analyst will not only recommend the best policy alternative but also the best political strategy for the adoption and implementation of this alternative.*

*The policy analysts are concerned wtih economic efficiency, with how public policies affect society as a whole. They emphasize explicitly defined policy objectives and conscious tradeoffs between competing objectives. They seek clear measures of outcomes of how succesfully these objectives are being realized. With a faith in their analytical technique, the analysts draw their policy recommendations from abstract, mathematical models.*

*In contrast, the policy politicians are concerned with distribution, with how public policies affect individuals and groups. They emphasize negotiation, bargaining and compromise, and the obscuration of*

---

<sup>20</sup> Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney., (2007). *Handbook Of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*, CRC Press. Hal. 112.

*competing objectives to achieve consensus. They seek the resolution of conflict between competing interests - the allocation of limited resources between such interests. With a faith in the political process, the politicians draw their policy recommendations from the intensity of their constituents views".<sup>21</sup>*

Yang diartikan bahwa analisis kebijakan memusatkan perhatian pada efisiensi dan hasil, dan mengabaikan biaya yang hangus, kebijakan politik prihatin dengan distribusi dan input, dan berusaha untuk membenarkan biaya hangus. Perbedaan-perbedaan ini, dapat diturunkan dari ketidakpedulian analisis terhadap para pemilih dan pengabdian politisi kepada mereka, kata penulis, yang menyarankan beberapa cara bagi analisis kebijakan untuk meningkatkan pengaruh politik mereka. Analisis kebijakan yang lengkap tidak hanya akan merekomendasikan alternatif kebijakan terbaik tetapi juga strategi politik terbaik untuk adopsi dan implementasi alternatif ini.

Analisis kebijakan prihatin dengan efisiensi ekonomi, dengan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Mereka menekankan tujuan kebijakan yang didefinisikan secara eksplisit dan pertukaran yang disadari antara tujuan yang bersaing. Mereka mencari langkah-langkah yang jelas dari hasil dari seberapa sukses tujuan ini direalisasikan. Dengan keyakinan pada teknik analitik mereka, para analisis mengambil rekomendasi kebijakan mereka dari model abstrak dan matematis.

Sebaliknya, kebijakan yang dibuat politisi peduli dengan distribusi, dengan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi individu dan kelompok. Mereka menekankan negosiasi, tawar-menawar dan kompromi, dan obsesi tujuan

---

<sup>21</sup> Robert D. Behn., (2015). Policy Analysis and Policy Politics, Universitas of California Press.

bersaing untuk mendapatkan konsensus. Mereka mencari penyelesaian konflik antara kepentingan yang bersaing daya yang terbatas di antara kepentingan tersebut. Dengan keyakinan bahwa dalam proses politik, para politisi menarik rekomendasi kebijakan mereka dari intensitas pandangan para konstituen mereka.

Dari penjelasan diatas jelas membedakan bahwa kebijakan publik berbeda dengan kebijakan politik. Kebijakan publik membahas tentang efisiensi dan keluaran-keluaran kebijakan yang keputusannya berdasarkan standar prosedur dan dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan kebijakan. Sedangkan kebijakan politik membahas tentang input (masukan) dan distribusi yang lebih ke prosesnya, bagaimana proses kebijakan terjadi, dibuat dan pembagian kekuasaannya. Kemudian keputusan politiknya tidak di dasari analisis apapun, lebih bersifat pragmatis yaitu apa yang dibutuhkan dan dapat dilakukan akan dilakukan segera mungkin sesuai dengan permasalahan yang ada.

Menurut pendapat dari jurnal Robert D. Behn menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan bagaimana sikap pragmatis dan peran pemerintah dengan lembaga serta hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana kebijakan yang lebih menekankan proses yang akan dilakukannya. Dalam pengertian ini jelas membedakan kebijakan politik dengan kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki makna yang luas yaitu lebih kepada kepentingan publik sedangkan kebijakan politik lebih terkait dengan kekuasaan maknanya sempit yaitu terkait kepada alur kerja sistem politik.

Kebijakan publik merupakan bagian dari kajian kebijakan politik. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu. Bidang tertentu yang dimaksud tersebut adalah bidang politik, sehingga kebijakan politik yang dimaksud disini berupa peraturan Perda dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

Dengan demikian penjabaran mengenai teori kebijakan politik lebih mendekati dalam menganalisis penelitian ini karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan kebijakan politik pemerintah yang sesuai dengan penelitian peneliti. Peneliti mengambil teori ini karena dari pengertian teori yang diatas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan karena kita dapat melihat bahwa dalam dua kepemimpinan Gubernur di Sumatera Selatan telah menerapkan sebuah upaya-upaya yang sesuai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Namun hal ini masih perlu di dukung dengan *research* di lapangan apakah kebijakan politik kedua gubernur sesuai seperti teori dari Robert D. Behn.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah,

data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.<sup>22</sup>

#### 1. Pendekatan / Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian kajian media dengan pendekatan kualitatif. Metodologi kajian media yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari berbagai media komunikasi apabila tidak dapat mewawancarai langsung subjek peneliti. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati<sup>23</sup>.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang membuat usaha untuk memahami suatu realitas lembaga tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat.<sup>24</sup>

#### 2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (informan atau responden melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang

---

<sup>22</sup> Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 212.

<sup>24</sup> Jonker Jan, J.W. Pennink Bartjan, Wahyuni Sri, *Metodologi Penelitian: panduan untuk master dan Ph.D di Bidang Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat. 2011) hal. 71

dilakukan sendiri oleh peneliti.<sup>25</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu sumber pertama dari media massa berupa berita kebijakan yang dilakukan oleh kedua gubernur atau informannya langsung yaitu Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kodam II Sriwijaya, dan masyarakat yang terkena dampak akibat kebakaran karena informan tersebut memiliki data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data.<sup>26</sup> Data berupa penunjang, yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung yaitu bisa melalui berita online, internet, jurnal, skripsi, berkas dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperkuat sumber data dan menunjang data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini digunakan dengan wawancara dan dokumentasi :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 66.

responden).<sup>27</sup> Penggunaan teknik ini bertujuan agar mendapatkan informasi langsung kepada semua informan yang berhubungan dengan kebijakan politik pemerintah Sumsel. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tanya jawab atau tatap muka langsung dengan sumber yang bersangkutan. Informan dalam wawancara penelitian ini yaitu Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Kodam II Sriwijaya karena informan tersebut memiliki data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>28</sup> Peneliti akan mengumpulkan data-data dari berita, himbauan-himbauan, artikel, foto dan video yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Dokumen yang diperoleh dari Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kodam II Sriwijaya.

---

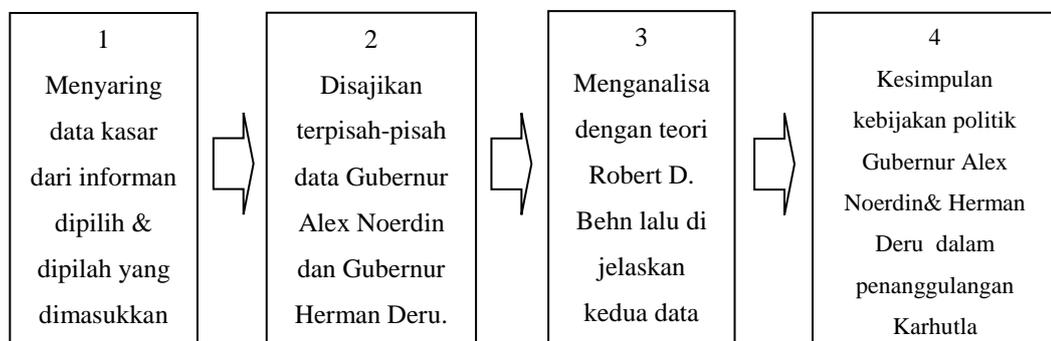
<sup>27</sup>Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 224.

<sup>28</sup>Nanang, *Op.cit.*, hal. 80.

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi data. Analisis dilakukan dengan membuat interpretasi data dengan megakibatkan sebab akibat munculnya fenomena yang di teliti. Guna memberi arti dari data, maka analisis dilakukan untuk lebih memahami isi pesan media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial/ realitas sewaktu pesan dibuat. Mengingat semua pesan merupakan produk sosial dan budaya masyarakat, maka inilah yang disebut analisis isi kualitatif<sup>29</sup>.

Penelitian ini bersifat deskripsi yang bertujuan agar memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis suatu data dari penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Proses penelitian yang peneliti teliti adalah dengan cara mengumpulkan semua data dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan media massa, catatan lapangan, dokumen resmi maupun pribadi, gambar dan juga foto.



<sup>29</sup> Budiyono. 2015. Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial. Hal 149

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun laporan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis skripsi dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai Gambaran umum Sumatera Selatan, Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan, Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan dan Profil Alex Noerdin dan Herman Deru.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah yang meliputi proses analisis dari data serta informasi yang sudah diperoleh mengenai Perbandingan upaya mantan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Sumatera Selatan**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.

#### **1. Letak Geografis**

Sumatera Selatan merupakan wilayah daratan rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 79$  meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 1-4° Lintang Selatan dan antara 102-106° Bujur Timur. Luas wilayah Sumatera Selatan adalah 87.421,24 km<sup>2</sup>.<sup>30</sup> Berdasarkan batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Bangka
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Sumatera Selatan juga terdiri dari 17 kabupaten/kota yaitu:

---

<sup>30</sup>Badan Pusat Statistik, 2017, Sumatera Selatan, hal 44.

- a. Kabupaten : Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Pali, Musi Rawas Utara.
- b. Kota : Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau.<sup>32</sup> Berikut luas daratan dari masing-masing kabupaten atau kota tersebut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Ogan Komering Ulu	3.747,77
2	Ogan Komering Ilir	17.086,39
3	Muara Enim	6.901,36
4	Lahat	4.297,12
5	Musi Rawas	6.330,53
6	Musi Banyuasin	14.530,36
7	Banyuasin	12.361,43
8	OKU Selatan	4.544,18
9	OKU Timur	3.397,10
10	Ogan Ilir	2.411,24
11	Empat Lawang	2.312,20
12	Pali	1.844,71
13	Musi Rawas Utara	5.836,70
14	Palembang	363,68
15	Prabumulih	458,11
16	Pagar Alam	632,80
17	Lubuk Linggau	365,49

**Sumber: Diolah dari Data BPS Sumatera Selatan 2018**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah yang paling luas diantara

<sup>32</sup> *Ibid.*,

kabupaten/kota Sumatera Selatan lainnya dengan luas wilayah 17.086,39 km<sup>2</sup> dan kota Palembang merupakan kota yang memiliki wilayah yang paling kecil diantara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan dengan luas wilayah 363,68 km<sup>2</sup>.

Secara topografi, wilayah Sumatera Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukti barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 – 1.200 meter dari permukaan laut.

Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964m), Gunung Dempo (3.159m), Gunung Patah (1.107m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komerling, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.<sup>33</sup>

Bentang alam sumsel yang terdiri dari 3 level, dataran tinggi di daerah bukit barisan mulai dari tanjung sakti, empat lawing lalu pagaram, level

---

<sup>33</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan) diakses pada 14 februari 2020

dataran sedang/tengah di daerah lahat, muaraenim, prabumulih yang kering dan dibawah level itu ada dataran rendah yang tinggi muka air tidak sampai semester di daerah Palembang, pesisir timur . Apapun yang terjadi di dataran tinggi bakal berakibat ke dataran rendah. Apabila musim hujan, pada dataran tinggi dari arah bukit barisan menyebabkan banjir parah di dataran rendah. Begitu pula saat musim kemarau sangat rentan kebakaran hutan dan lahan tepatnya di bagian pesisir timur.

Kawasan gambut yang masuk bentang alam Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, bukan hanya kawasan konservasi, juga kawasan produksi yang dikelola perusahaan dan masyarakat. Sekitar 20 ribu hektare lahan gambut merupakan lahan terbuka, yang dapat diakses masyarakat desa yang berada di sekitarnya. Mereka melakukan aktivitas seperti membuat padi sonor, mencari ikan, dan kayu. Ada lima desa di Kabupaten OKI yang masyarakatnya memanfaatkan lahan gambut 20 ribu hektare tersebut yakni Desa Riding, Air Rumbai, Rambai, Bukit Batu, dan Perigi Talang Nangka. Namun, ada juga desa yang tidak memiliki MPA yakni Desa Bukit Batu. Alasannya, hampir setiap musim kemarau, lahan gambut di desanya seluas 6000 ha, yang masuk bentang alam Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, mengalami kebakaran akibat aktivitas mencari kayu atau bertanam padi sonor.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <https://www.mongabay.co.id/2017/08/31/menanti-peran-optimal-masyarakat-peduli-api-di-bentang-alam-padang-sugihan/> diakses pada 14 februari 2020

## 2. Kependudukan

Populasi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Sumatera Selatan adalah 8.160.901 jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk Sumatera Selatan berjumlah 8.266.983 jiwa.<sup>35</sup> Berikut adalah tabel jumlah penduduk kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Ogan Komering Ulu	359.092
2	Ogan Komering Ilir	809.203
3	Muara Enim	618.762
4	Lahat	401.494
5	Musi Rawas	394.384
6	Musi Banyuasin	629.791
7	Banyuasin	833.625
8	OKU Selatan	352.926
9	OKU Timur	663.481
10	Ogan Ilir	419.773
11	Empat Lawang	244.312
12	Pali	184.671
13	Musi Rawas Utara	187.635
14	Palembang	1.623.099
15	Prabumulih	182.128
16	Pagar Alam	136.605

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 43

17	Lubuk Linggau	226.002
<b>Jumlah</b>		<b>8.266.983</b>

**Sumber: Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2017**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar adalah di Kota Palembang berjumlah 1.623.099 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil yaitu di Kota Pagar Alam yang memiliki jumlah penduduk sebesar 136,605 jiwa. Serta total dari jumlah penduduk Sumatera Selatan di tahun 2017 ini secara keseluruhan adalah 8.266.983 jiwa.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017**  
**Menurut Agama Yang Dianuti**

No.	Kabupaten/kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Ogan Komering Ulu	327.662	6.762	5.355	1.666	756
2	Ogan Komering Ilir	761.403	88.820	3.084	5.729	2.872
3	Muara Enim	588.287	2.455	1.349	840	478
4	Lahat	474.709	5.415	1.719	127	503
5	Musi Rawas	434.370	3.675	3.616	1.389	276
6	Musi Banyuasin	631.749	5.719	1.128	2.720	130
7	Banyuasin	882.658	3.729	4.387	1.558	423
8	OKU Selatan	367.305	594	208	1.328	70
9	OKU Timur	681.482	10.381	11.953	15.860	573
10	Ogan Ilir	453.846	661	110	38	762
11	Empat Lawang	202.985	198	27	-	-
12	Pali	192.485	473	95	2	69
13	Musi Rawas Utara	197.674	535	89	817	-
14	Palembang	1.371.138	51.910	26.485	4.463	23.246
15	Prabumulih	154.779	853	550	143	1.538
16	Pagar Alam	147.839	307	376	13	166
17	Lubuk Linggau	317.676	2.365	1.761	201	2.294

<b>Jumlah</b>	<b>8.188.045</b>	<b>184.852</b>	<b>62.292</b>	<b>36.894</b>	<b>34.156</b>
---------------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

**Sumber: Diolah dari Data BPS Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan adalah kabupaten/kota yang memiliki penduduk mayoritas menganut agama islam dengan jumlah 8.188.045 jiwa, diikuti jumlah pemeluk agama lainnya yaitu Protestan berjumlah 184.852 jiwa, Katolik 62.292 jiwa, Hindu 36.894 jiwa dan Budha 34.156 jiwa.

## **B. Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan**

Potensi kebakaran hutan dan lahan lebih besar pada lahan gambut jika terjadi pengeringan. Hal ini disebabkan oleh fungsi penyerapan air pada gambut yang sangat kering akan sulit dilakukan karena gambut sudah tidak berfungsi sebagai tanah dan sifatnya sama seperti kayu kering.

Dari tahun 1997 hingga kini, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Seperti diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan termasuk ke dalam salah satu provinsi rawan kebakaran di Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan dalam periode terakhir selalu mengalami kebakaran di posisi berbahaya terkait dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah sendiri menyadari Karhutla merupakan masalah multidimensi yang memerlukan koordinasi untuk menanganinya. Berikut Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Di Sumatera Selatan<sup>36</sup> :

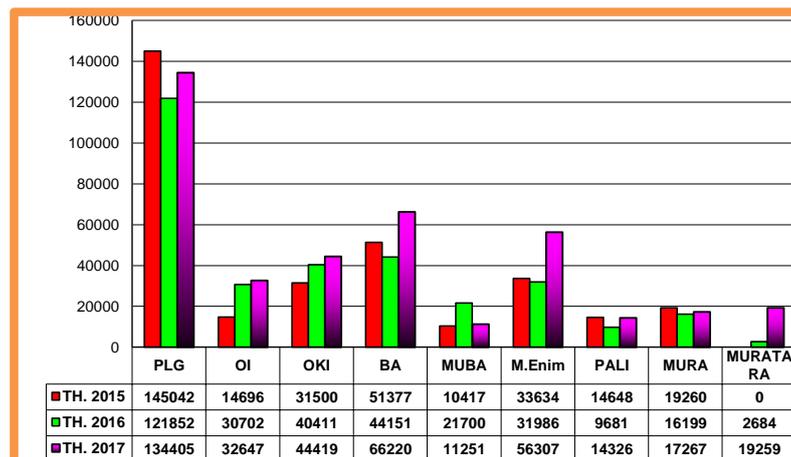
Tahun	Luas Terbakar
2015	646.298,80
2016	8.784,91
2017	3.625,66

<sup>36</sup> [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) diakses pada 14 Februari 2020

2018	16.226,60
2019	328.457,00

Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2015 tergolong lebih parah dibandingkan Tahun 2014, karena waktunya lebih lama, areal yang terbakar lebih luas, dampak yang ditimbulkan lebih besar dan mobilisasi/ pengerahan sumber daya Daerah dan Nasional lebih besar. Lokasi kebakaran secara umum terjadi di semua wilayah Sumatera Selatan, namun yang paling luas dan terus menerus terjadi sejak awal sampai akhir kejadian adalah pada lahan gambut. Khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Pampangan, Cengal, Pedamaran, Pangkalan Lampam dan Pedamaran Timur) yang dari tahun ke tahun selalu mengalami kebakaran.

Adapun data penemuan kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) secara kumulatif di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota terdampak karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2015 s/d September 2017, sebagaimana berikut :



**Grafik.2.1 Penemuan Kasus ISPA Tahun 2015-2017**

Sumber : BPBD Sumsel

Dari grafik diatas angka kesakitan ISPA berfluktuasi setiap tahunnya, hal ini dikarenakan aktifnya fasilitas pelayanan kesehatan baik ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit Melaporkan penyakit ISPA. Penyebab Utama Penyakit ISPA adalah bakteri, virus dan riketsia, sedangkan kabut asap dan debu yang mencemari udara dapat memperburuk keadaan penderita. Sedangkan data pada tahun 2019 peningkatan kasus ISPA sangat parah dari berbagai daerah terutama di Palembang menjadi tingkat tertinggi kasus ISPA. Jumlah Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Secara Kumulatif Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Data Jumlah Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut Tahun 2019**

<b>KAB/KOTA</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ags</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>
<b>OKU</b>	1,581	2,188	1,430	1,865	1,248	1,307	1,324	1,734	1,430	1,368	0
<b>OKI</b>	2,852	2,441	2,427	3,313	1,526	1,162	1,651	3,119	2,217	2,637	0
<b>Muara Enim</b>	5,646	5,091	7,156	7,156	5,042	5,314	5,173	6,553	2,943	6,308	0
<b>Lahat</b>	2,481	2,645	3,671	2,821	2,206	2,274	2,553	2,231	2,883	2,659	0
<b>Musi Rawas</b>	798	1,417	1,712	1,579	2,435	1,024	1,557	1,812	2,088	297	0
<b>Musi Banyuasin</b>	3,030	4,065	4,150	3,862	3,496	3,273	4,094	6,326	7,456	6,346	0
<b>Banyuasin</b>	5,812	6,979	6,095	6,950	5,699	5,336	5,511	5,487	7,416	6,652	0
<b>OKU Selatan</b>	1,423	1,568	738	474	594	622	772	956	570	358	0
<b>OKU Timur</b>	2,111	2,426	2,204	1,526	1,140	1,289	1,538	1,832	1,187	1,436	0
<b>Ogan Ilir</b>	563	1,141	1,940	3,243	1,402	1,958	578	3,466	5,295	4,114	0
<b>Empat Lawang</b>	573	339	614	757	744	649	475	467	450	435	0
<b>Palembang(K)</b>	11,274	15,259	16,769	15,126	11,111	10,623	10,744	11,863	14,714	13,643	0
<b>Prabumulih(K)</b>	1,424	1,779	1,824	1,910	1,589	1,590	1,363	1,197	1,252	1,287	0
<b>Pagar Alam(K)</b>	432	389	401	585	401	406	402	131	569	-	0
<b>Lubuk Linggau(K)</b>	1,420	1,538	1,784	1,780	1,382	1,219		1,239	1,638	452	0
<b>Penkal Abab Lemat</b>	1,227	1,572	1,322	1,462	1,274	1,376	1,452	1,933	1,853	1,606	0
<b>MURA Utara</b>	1,495	0	828	828	294	261	215	516	1,287	1,134	0
<b>Jumlah</b>	<b>44,142</b>	<b>50,837</b>	<b>55,065</b>	<b>55,237</b>	<b>41,583</b>	<b>39,683</b>	<b>39,402</b>	<b>50,862</b>	<b>55,248</b>	<b>50,732</b>	<b>0</b>

Sumber : BPBD Sumsel

Dilihat dari data tabel diatas jelas diketahui bahwa tahun 2019 yang paling banyak terkena penyakit ISPA dari pada tahun sebelumnya, terutama daerah Kota Palembang dari Januari hingga Oktober yaitu sejumlah 131,153 penderita dibandingkan daerah lain.

### **C. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan**

Menurut Abdullah terdapat tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, antara lain 1) Adanya kebijakan yang dilakukan, 2) Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan, dan 3) Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>37</sup>

Sumatera Selatan memiliki 171 desa yang menjadi sasaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut, atau lokasi yang selama ini sering mengalami kebakaran. Di Kabupaten OKI ada 84 desa di 12 kecamatan. Kemudian di Kabupaten Banyuasin sebanyak 23 desa di 11 kecamatan, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 41 desa di 9 kecamatan, serta di Kabupaten Ogan Ilir dengan 23 desa di 7 kecamatan. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), baik yang

---

<sup>37</sup> Syukur, Abdullah.1987. KumpulanMakalah”Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”,Persadi,Ujung Pandang,Hal 398

difasilitasi pemerintah, LSM, maupun perusahaan yang beroperasi di sekitar desa.<sup>38</sup>

Pada periode Alex Noerdin saat masa Asian Games 2018, ia bergerak cepat dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, antara lain melaksanakan rapat koordinasi di tingkat Provinsi, menetapkan keadaan status Siaga Darurat Bencana Asap akibat karhutla, dalam rangka memudahkan upaya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengendalian karhutla, membentuk Posko Siaga Darurat Bencana Asap akibat karhutla, melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla.<sup>39</sup> Dilanjutkan periode Herman Deru pengendalian karhutla di tahun 2019 kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan karhutla sama saja setiap tahunnya seperti yang dilakukan oleh lembaga - lembaga penanggulangan karhutla lainnya.

## **D. Profil Gubernur Alex Noerdin dan Herman Deru**

### **1. Profil H. Alex Noerdin<sup>40</sup>**

Nama : Alex Noerdin

Agama : Islam

T.T.L : Palembang, 9 September 1950

Zodiac : Virgo

Hobby : karate-do, judo, menembak, billiard, renang  
bola



---

<sup>38</sup> <https://www.mongabay.co.id/2017/08/31/menanti-peran-optimal-masyarakat-peduli-api-di-bentang-alam-padang-sugihan/> diakses pada 14 februari 2020

<sup>39</sup> Data Laporan BPBD Sumsel Tahun 2018

<sup>40</sup> <https://m.merdeka.com/alex-noerdin/profil/> diakses pada 4 Januari 2019.

### **a. Biografi**

H. Alex Noerdin adalah politisi Golkar kelahiran Palembang, 9 September 1950, anak ketiga dari tujuh bersaudara pasangan H.M. Noerdin Pandji dan Hj. Siti Fatimah. Ayahnya, Noerdin Pandji adalah seorang pejuang kemerdekaan, tak heran jika darah pejuang mengalir dalam dirinya. Sejak kecil, keluarganya mengutamakan pendidikan, dan Alex sendiri adalah sosok pembelajar. Terbukti, selain lulus dari Universitas Trisakti dan Atmajaya, Alex kerap ‘mengejar’ course hingga ke luar negeri. Hal ini diterapkannya pula pada anak-anaknya, yaitu harus menuntut ilmu setinggi mungkin.

Sejak masih di bangku sekolah, Alex memang hobi berorganisasi. Hingga kini, ia masih aktif dalam berbagai macam organisasi, dari yang bersifat kemasyarakatan hingga kepemudaan, olah raga, pengusaha, maupun politik. Untuk organisasi terakhir ini, Alex adalah salah satu kader partai Golkar yang mentereng. Ia mengawali karir politiknya dengan menjadi Juru kampanye dan pengajar karakterdes Golkar Kota Madya Palembang pada tahun 1982, dan kemudian menjadi wakil sekretaris DPD Golkar Kota Madya Palembang pada tahun 1988. Karena loyalitas dan kemampuannya memimpin, ia diangkat menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. Alex Noerdin pernah menjabat sebagai Bupati Musi Bayuasin dalam dua periode berturut-turut (2001-2006 dan 2007-2012), namun ia mengundurkan diri di tengah periode kedua masa jabatannya, tepatnya pada

14 Juni 2008 untuk mengikuti pencalonan sebagai Gubernur Sumatera Selatan dalam pilkada 2008-2013.<sup>41</sup>

Alex terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan, dan resmi bertugas sejak 7 November 2008. Di tengah masa jabatannya yang baru berumur 4 tahun, Alex kembali ‘hengkang’. Ia dicalonkan oleh partainya untuk mengikuti Pilkada dalam perebutan kursi Gubernur Jakarta 2012-2017. Meski dia gagal dalam pemilihan calon gubernur DKI Jakarta tak membuat karir politik H. Alex Noerdin tumbang. tetap diharapkan Golkar bisa terpilih kembali menjadi Gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada 2013. Selama hidupnya, Alex telah mengoleksi puluhan penghargaan sebagai apresiasi prestasinya baik dalam bidang pemerintahan, sosial, olahraga, maupun kepemudaan dan kemasyarakatan.

#### **b. Pendidikan**

Ditinjau dari riwayat pendidikan H. Alex Noerdin, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sarjana (S1) Universitas Triksakti (1980)
- 2) Sarjana (S1) Universitas Atmajaya (1981)
- 3) *International Training Course in Regional Development Planning, United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) Nagoya, Japan (1985)*
- 4) *Post Graduate Diploma: Integrated Development Management Institute for Housing Studies, Rotterdam Netherlands (1987-1988)*

---

<sup>41</sup> Tiribunnews, <https://www.tribunnews.com/regional/2013/11/07/alex-noerdin-ishak-mekki-resmi-pimpin-sumsel> Alex Noerdin: Putra Daerah yang Menjadi Pemimpin Sumsel, diakses pada 4 Januari 2019.

5) *Program of the United Housing Urbanization, Harvard University, Cambridge (1992)*

6) *International Training Course in Integrated Urban Policy United Nations Population Fund (UNFP) Kobe, Japan (1996)*

**c. Karir**

Dengan segala aktivitas H. Alex Noerdin sangat aktif dibidang pemerintahan hal ini terlihat, sebagai berikut :

- 1) Gubernur Sumatera Selatan 2008-2013
- 2) Bupati Musi Banyuasin selama 2 periode berturut-turut (2001-2006 dan 2007-2012)
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (1999)
- 4) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (1998)
- 5) Ketua Bappeda Kodya Palembang (1994)
- 6) Kepala Dinas Pariwisata Kodya Palembang (1990)
- 7) Kacabdin Pariwisata Kodya Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin (1989)
- 8) Pj. Kabid fisik Prasarana Bappeda Tk. I Sumatera Selatan (1988)
- 9) Kasi Perhubungan dan Pariwisata Bappeda Tk. I Sumatera Selatan (1983)
- 10) Staf bappeda Tk. I Sumatera Selatan (1981).

**d. Organisasi**

Dibidang organisasi pun H. Alex Noerdin sangat berperan aktif dan ikut serta, terbukti dari beberapa catatan organisasi beliau sebagai berikut :

- 1) Ketua Forum Kom[unikasi Daerah Penghasil Migas/FKDPM (2006-2009)
- 2) Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kodya Palembang (1981)
- 3) Ketua DPD Pemuda Panca Marga Propinsi Sumatera Selatan (1987)
- 4) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Panca Marga (1991)
- 5) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Patriot Panca Marga (2002-2018), dan Ketua DPD Patriot Panca Marga Propinsi Sumatera Selatan (2007-2012).
- 6) Aktif di berbagai organisasi cabang olahraga mulai dari karate-do, judo, menembak, billiard, renang, catur, bola basket, hingga sepak bola.
- 7) Ketua DPD INKAI Sumatera Selatan 1993-1995)
- 8) Wakil Ketua POSSI (1997-2018)
- 9) Wakil Ketua PB PRSI (2005-2018)
- 10) Ketua Bidang Dana PB PABSI (2006-2011)
- 11) Ketum Perbakin Sumatera Selatan (2006-2010)
- 12) Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Selatan (2004-2009)
- 13) Juru Kampanye dan Pengajar Karakterdes Golkar Kodya Palembang (1982) dan Wakil Sekretaris DPD Golkar Kodya Palembang (1988).

**e. Penghargaan**

Beberapa penghargaan yang H. Alex Noerdin peroleh, yakni :

- 1) Penghargaan sebagai Tokoh Pemerhati Karang Taruna dari Gubernur Sumatera Selatan 2001

- 2) Manggala Karya Kencana "Penghargaan dalam mendukung keberhasilan Program KB Nasional untuk mewujudkan keluarga berkualitas" dari Kepala BKKBN 2002
- 3) Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia 2002
- 4) Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dari Mendiknas 2002
- 5) ASKES Award Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Sistem Asuransi Kesehatan
- 6) Anugerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara dari Presiden RI 2002
- 7) Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia 2002
- 8) Penghargaan dari PWI atas kerjasama dengan pihak PERS 2003
- 9) Penghargaan Olahraga pada hari OLAHRAGA NASIONAL XX dari Gubernur Sumsel 2003
- 10) Penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden dan Wirakarya Kencana dari Kepala BKKBN dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Program KB dan Keluarga Sejahtera serta membangkitkan motivasi bagi para pengelola Program KB Nasional Pembangunan Keluarga Sejahtera 2003
- 11) Penghargaan atas Partisipasi dan Prakarsa dalam Mengembangkan Berbagai Program/Kegiatan Mewujudkan Ketahanan Pangan di wilayahnya dari Gubernur Sumatera Selatan 2003

- 12) Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Arutala atas Pengabdian dan Jasa Besar di Bidang Pembangunan Kesehatan dari Menteri Kesehatan RI 2003
- 13) Penghargaan di Bidang Ketahanan Pangan dari presiden RI 2004
- 14) Satya Lancana Pembangunan 2004
- 15) Penghargaan Bidang Kelistrikan dari PLN WS2JB 2004
- 16) Penghargaan Anggota Kehormatan Purna Praja STPDN 2004
- 17) Lencana Aditya Karya Mahatua Yoda Utama II dari Menteri Sosial RI
- 18) Penghargaan Pembina Terbaik Karang Taruna, Bangka 2004
- 19) Penghargaan Bidang Otomotif dari IMI Pusat
- 20) Penghargaan Piala Adipura Kategori kota Kecil Terbersih 2005
- 21) Penerima Gelar Adat "yang Dipertuan Datuk Sri Paduka Baginda" dari Yang DIpertuan Agung Raja Alam Pangaruyung 2005
- 22) Penghargaan Adi Manggalya Krida dari Presiden RI
- 23) Penghargaan Pembina Olahraga terbaik 2005
- 24) Anugrah Kepemudaan Tahun 2005 dari Pemerintah Republik Indonesia
- 25) Pengakuan PBB dan ASEAN 2005
- 26) Bintang Kelas Utama Pemuda Pancamarga
- 27) Piagam Penghargaan Widya Praja dari PGRI 2006
- 28) Penghargaan Piala Adipura Kategori LKOta Kecil Terbersih 2006
- 29) Anugerah Delima Eka YAsa dari PP.IBI 2006

- 30) Penghargaan dari PW.NU Sumsel atas Bimbingan dan Bantuan untuk Pengembangan Jam'iyah NU dan Umat 2006
- 31) Penghargaan dari PMI Pusat dalam Bidang Kemanusiaan atas bantuan, sumbangan dan perhatian terhadap kemajuan PMI 2006
- 32) Penghargaan Lencana Melati dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 2006
- 33) Piala Citra Pelayanan Prima Bidang Air Bersih dari Presiden RI 2006
- 34) Penghargaan selaku Pembina Karang Taruna dari Gubernur Sumatera Selatan 2007
- 35) Penghargaan Suratin Madya dari Ketua Umum PSSI 2007
- 36) Patri Award 2007
- 37) Penghargaan Insan pemerhati Mode Indonesia Sumsel 2007
- 38) Warga Kehormatan Korps Brigade Mobile (BRIMOB) 2007
- 39) Satyalencana Pembangunan bidang pendidikan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2007
- 40) Mendapat Gelar Sultan Agung H. Alex Noerdin Bandar Adat Munggu dari kerabat adat Munggu
- 41) Penghargaan Tokoh Aparatur Negara Anti Narkoba 2008
- 42) Bintang Keteladanan Koperasi dari Ketua Umum Dekopin Prof Dr Sri Edi Swasono 2008
- 43) Penghargaan Piala Adibahasa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Thn. 2014
- 44) Penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI Thn. 2014

45) Penghargaan Green Province Thn. 2014

**f. Kehidupan Pribadi**

H. Alex Noerdin lahir di Palembang, pada tanggal 9 September 1950, dari pasangan H.M. Noerdin Pandji dan Hj. Siti Fatimah. Dia menikah dengan Hj. Sri Eliza dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Dodi Reza Alex, Lic, MBA, Deni Akendra Alex (Alm), dan Luri Elza Alex, SH., LL.M. Sebagai seorang pemimpin, H. Alex Noerdin dikenal masyarakat luas sebagai pemimpin yang memiliki kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Kesuksesan yang diraih meliputi bidang pendidikan, organisasi, dan pemerintahan. Kesuksesan ini tercermin dari rekam jejak kehidupannya selama ini.

Di bidang organisasi, sejak dulu hingga sekarang, sosok yang kini tengah menjabat Ketua Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas/FKDPM (2006-2009) ini terkenal sebagai figur yang sangat aktif dan sukses dalam memimpin berbagai jenis organisasi. Baik organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, organisasi keolahragaan, maupun organisasi politik. Pada organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, tokoh masyarakat ini pernah dan atau tengah menjabat Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kodya Palembang (1981), Ketua DPD Pemuda Panca Marga Propinsi Sumatera Selatan (1987), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Panca Marga (1991), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Patriot Panca Marga (2002-sekarang), dan Ketua DPD Patriot Panca Marga Propinsi Sumatera Selatan (2007-2012). Selanjutnya, dirinya juga sangat aktif dan sukses memimpin berbagai organisasi cabang olahraga mulai dari karate-do, judo, menembak, billiard,

renang, catur, bola basket, hingga sepak bola. Beberapa jabatan strategis berhasil diraihinya, di antaranya adalah Ketua DPD INKAI Sumatera Selatan (1993-1995), Wakil Ketua POSSI (1997-sekarang), Wakil Ketua PB PRSI (2005-sekarang), Ketua Bidang Dana PB PABSI (2006-2011), Ketua Perbakin Sumatera Selatan (2006-2010). Sementara dalam organisasi politik, sebelum diamanahi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Selatan (2004-2009), dirinya pernah menjadi Juru Kampanye dan Pengajar Karakterdes Golkar Kodya Palembang (1982) dan Wakil Sekretaris DPD Golkar Kodya Palembang (1988).

Bahkan, karena dinilai berhasil menjalankan amanah sebagai Bupati dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Musi Banyuasin, melalui Pilkada Langsung tahun 2006, Beliau kembali terpilih sebagai Bupati untuk memimpin dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode tahun 2007-2012. Serta, menjadi Gubernur Sumatera Selatan selama 2 periode pada tahun 2008-2018. Bukti kongkrit keberhasilan kepemimpinan sebagai Kepala Daerah terlihat dari banyaknya penghargaan dan tanda jasa yang diterima dari pemerintah pusat, lembaga independen, dan masyarakat dalam sektor pemerintahan, organisasi, sosial dan budaya.

#### **g. Visi Dan Misi**

##### 1) Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti

2013-2018, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, yaitu :

**“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN  
BERDAYA SAING INTERNASIONAL”**

2) Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- ii. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- iii. Meningkatkan Stabilitas Daerah
- iv. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan
- v. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Yang Lestari Dan Pengelolaan Bencana.

## 2. Profil Herman Deru<sup>42</sup>

Nama lengkap : Herman Deru

Pekerjaan : Gubernur

Lahir : Belitang, Oku Timur, 17 November 1967

Agama : Islam



---

<sup>42</sup> <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/21/herman-deru-gubernur-sumatera-selatan> diakses pada 4 Januari 2019.

### **a. Biografi**

Herman Deru lahir pada tanggal 17 November 1967 di Belitang dan merupakan anak ke-6 dari 14 bersaudara. Nama beliau merupakan singkatan dari lahir zaman Orde Baru. Ia sempat menjadi calon Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) pada tahun 1999 sebelum kalah oleh Syahrial Oesman dengan selisih hanya satu suara saja di DPRD Ogan Komering Ulu.

Berawal wiraswasta, Herman Deru menjadi PNS. Mengundurkan diri dari pegawai pemerintah, ia terjun ke dunia politik. Terpilih sebagai bupati hingga gubernur. Herman Deru, seorang Putera Daerah keturunan suku Komering merupakan mantan Bupati Ogan Komering Ulu (Oku) Timur yang telah menjabat selama dua periode sejak 2005. Pada Pilkada 2018, dirinya diusung sebagai calon wakil gubernur Sumatera Selatan berpasangan dengan Mawadi Yahya. Pria kelahiran Belitang, 17 November 1967 ini menempuh seluruh pendidikannya di Sumatera Selatan. Suami dari Febrita Lustia ini mengawali kariernya sebagai seorang wirausaha. Lalu, pada tahun 1987 dirinya diangkat sebagai PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah mengabdikan kurang lebih 11 tahun, pada tahun 1998 Herman menanggalkan jabatannya sebagai PNS. Ayah empat anak ini kemudian kembali fokus mengembangkan bisnisnya. Di samping itu, Herman juga didapuk sebagai Bendahara Yayasan Trisna Negara OKU Timur sejak 1996 hingga kini.

Pada tahun 2005, putra keenam dari 14 bersaudara ini terpilih sebagai Bupati Ogan Komering Ulu (Oku) Timur. Selain itu, ia juga sempat

mengambil program magister Manajemen STIE TRISNA NEGARA Belitang dan lulus tahun 2008. Selama menjadi Bupati, Herman dikenal bijaksana. Ia juga berhasil melakukan pembangunan di OKU Timur. Menurutnya, membangun tidak boleh di satu titik saja, semuanya harus merata. Pada masa kepemimpinannya, isyu korupsi pun jauh dari dirinya. Kepercayaan warga terbukti dengan kembalinya terpilih Herman Deru untuk menjabat sebagai Bupati lagi di periode 2010-2015. Pada Pilkada 2018, Herman Deru berpasangan dengan Mawadi Yahya maju sebagai salah satu pasangan cagub dan cawagub Sumatera Selatan. Mereka didukung oleh 3 partai yaitu PAN dengan 6 kursi, Nasdem berjumlah 5 kursi, dan Hanura sebanyak 5 kursi di DPRD Sumatera Selatan. Herman Deru-Mawardi Yahya memperoleh posisi puncak versi quick count. Berdasarkan data dari LSI, Herman Deru-Mawadi Yahya memperoleh 35,54 persen suara, Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda 32.10 persen suara, Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyudin 21.01 persen suara, dan Saifuddin Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah 11.35 persen suara.

**b. Pendidikan**

- 1) SD Negeri 1 Sidomulyo Belitang (1979)
- 2) SMP Negeri 1 Belitang (1982)
- 3) SMA Negeri 3 Palembang (1985)
- 4) Fakultas Hukum Universitas Shakyakirti Palembang (1995)
- 5) Magister Manajemen STIE TRISNA NEGARA Belitang (2008)

**c. Karier**

- 1) Wiraswasta 1985-1987
- 2) Pegawai Negeri Sipil Pemda Tk.I Sumatra Selatan pada Dinas Pendapatan Daerah Tk.I Sumatra Selatan 1987-1998 (mengundurkan diri, berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri).
- 3) Bendahara Yayasan Trisna Negara OKU Timur 1996-sekarang.
- 4) Melanjutkan berwiraswasta 1998-sekarang.
- 5) Bupati Ogan Komering Ulu Timur periode tahun 2005-2010.
- 6) Bupati Ogan Komering Ulu Timur periode tahun 2010-2015.
- 7) Gubernur Sumatra Selatan 2018-sekarang.
- 8) Riwayat Organisasi[sunting | sunting sumber]
- 9) Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP Negeri 1 Belitang.
- 10) Dewan Pertimbangan Organisasi GM Kosgoro Tk.II Palembang 1995.
- 11) Dewan Penyantun Yayasan Masjid Istiqlal Sidomulyo Belitang tahun 1996.
- 12) Wakil Bendahara Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Palembang 1997.
- 13) Komisi Ekonomi DPD KNPI Tingkat I Sumatra Selatan 1997.
- 14) Dewan Penyantun STIE Trisna Negara, Belitang 1997.
- 15) Dewan Penyantun Yayasan Pendidikan Belitang 1997.
- 16) Pembina Lingkar Studi Mahasiswa Sumatra Selatan 1998.
- 17) Ketua Bidang Koperasi BPC GAPENSI Kodya Palembang.
- 18) Pembina Remaja Mesjid Nurul Huda Palembang 1998.
- 19) Dewan Penasehat Taekwondo Indonesia Cabang Palembang 1999.

- 20) Dewan Penasehat PALATRA (Pecinta Alam Trisna Negara) OKUT.
- 21) Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pembangunan SDM Palembang (1999-sekarang).
- 22) Dewan Penasehat Koperasi Trisna Negara Sejahtera OKUT (1999-sekarang).
- 23) Ketua Badan Futsal Propinsi Sumatra Selatan periode 2009-2013.
- 24) Ketua Forum Daerah Penghasil Pangan periode 2010-2014.
- 25) Ketua Pengda Lemkari periode 2010-2015.

**d. Organisasi**

- 1) Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP Negeri 1 Belitang
- 2) Dewan Pertimbangan Organisasi GM Kosgoro Tk.II Palembang (1995)
- 3) Dewan Penyantun Yayasan Masjid Istiqlal Sidomulyo Belitang tahun (1996)
- 4) Wakil Bendahara Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Palembang (1997)
- 5) Komisi Ekonomi DPD KNPI Tk.I Sumatera Selatan (1997)
- 6) Dewan Penyantun STIE Trisna Negara, Belitang (1997)
- 7) Dewan Penyantun Yayasan Pendidikan Belitang (1997)
- 8) Pembina Lingkar Studi Mahasiswa Sumatera Selatan (1998)
- 9) Ketua Bidang Koperasi BPC GAPENSI Kodya Palembang
- 10) Pembina Remaja Mesjid Nurul Huda Palembang (1998)
- 11) Dewan Penasehat Taekwondo Indonesia Cabang Palembang (1999)
- 12) Dewan Penasehat PALATRA (Pecinta Alam Trisna Negara) OKUT
- 13) Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pembangunan SDM Palembang

(1999-Sekarang)

14) Dewan Penasehat Koperasi Trisna Negara Sejahtera OKUT (1999-Sekarang)

15) Ketua Badan Futsal Propinsi Sumatera Selatan periode (2009-2013)

16) Ketua Forum Daerah Penghasil Pangan periode (2010-2014)

17) Ketua Pengda Lemkari periode (2010-2015)

**e. Penghargaan**

1) Mendapat Gelar Kanjeng Raden Harya (KRH) oleh Sri Susuhunan PB XIII Sinuhun Tedjowulan (2011)

2) Manggala Karya Kencana (2007)

3) Satya Lencana Pembangunan (2007)

4) Satya Lencana Wira karya (2009)

**f. Kehidupan Pribadi**

Herman Deru lahir ketika orde baru mulai berjaya. Herman Deru merupakan orang Putra Daerah (Suku Komerling) dan memiliki istri bernama Febrita Lustia orang asli Sumatera Selatan yang lahir di Palembang. Herman Deru dan Febrita Lustia memiliki 4 orang anak yakni Percha Leanpuri (Anggota DPD RI dari Sumatra Selatan (2009-2015), Samantha Tivani, Leony Marezza Putri dan Ratu Tenny Leriva.

Herman Deru, yang juga biasa dikenal dengan sebutan akronimnya: HD, adalah sosok yang diakui publik keberhasilannya. Dia mendapatkan 29 jenis penghargaan, diantaranya Penghargaan Satya Lencana Wirakarya oleh Presiden RI karena keberhasilannya sebagai Bupati. Ia berhasil menurunkan

angka kemiskinan (pra sejahtera) dari 12,81 persen di tahun 2018 menjadi 10 persen di tahun 2019. Berbagai kebijakan yang diambilnya saat menjadi Bupati menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Herman Deru berhasil melaksanakan pembangunan termasuk di dalamnya keberhasilan pelaksanaan good governance dan harmoni. Bagi Herman Deru, warga Sumsel dan Provinsi Sumsel adalah segalanya. Tidak diragukan lagi bahwa segala kebijakan dan program pembangunan termasuk advokasi warga terkait soal listrik, gas, pemerataan pembangunan menjadi concern dirinya. Berulang kali Deru menyatakan pentingnya pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi.

Saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati OKU Timur, ternyata ia memiliki julukan unik yakni Bupati 25. Julukan tersebut bukanlah tanpa alasan, hal itu terkait dengan kebiasaan Herman Deru yang unik menurut takaran cara kerja Bupati pada umumnya dan sangat berbeda. Herman Deru ternyata hanya 2 hari saja kerja di kantor dan 5 hari selebihnya ia gunakan turun ke lapangan, mengunjungi desa-desa, berdialog dengan warga, menyerap berbagai aspirasi dan masalah yang dihadapi warga. Itu pula mengapa Herman Deru lebih suka tinggal di rumah peninggalan almarhum ayahnya, H. Hamzah, di Belitang, ketimbang di rumah dinas di Martapura. Menurutnya di Belitang, warga tak sungkan datang dan pergi menyampaikan bermacam-macam masalah. Setelah itu ditahun 2018 tepatnya 1 Oktober 2018, Herman Deru resmi menjadi pemimpin Gubernur Sumatera

Selatan. Namun disamping karir politiknya yang kian cemerlang, Herman Deru tetap melanjutkan karir berwiraswastanya.

Setelah pelantikan presiden 20 Oktober 2019, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendukung penuh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menjalankan roda pemerintahan. Herman Deru berharap, pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan, proyek strategis nasional (PSN) di Sumatera Selatan dapat kembali dilanjutkan. Serta jangan pernah ada yang dikoreksi lagi. Seperti Tanjung Api-Api dan Pelabuhannya, juga Jalan Tol Indralaya-Lubuk Linggau dan Jalan Tol Kapal Betung. Selain PSN, jalan nasional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan juga harus menjadi perhatian khusus. Sebab, jalan penghubung yang ada di 'Bumi Sriwijaya' itu merupakan urat nadi perekonomian nasional.<sup>43</sup>

#### **g. Visi dan Misi**

Visi : **“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”**

Misi :

- 1) Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan dipertanian maupun pedesaan

---

<sup>43</sup> <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/21/herman-deru-gubernur-sumatera-selatan> diakses pada 4 Januari 2020.

- 2) Meningkatkan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas,
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.<sup>44</sup>

#### **E. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

---

<sup>44</sup> <https://dprd.sumselprov.go.id/visi-misi-gubernur-dan-wakil-gubernur-sumatera-selatan-periode-2018-2023-sumatera-selatan-maju-untuk-semua/> diakses pada 4 Januari 2019.

- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 21 April 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- 6) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 11 Tahun 2015, tanggal 2 April 2015, tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.<sup>45</sup>

Dengan adanya dasar hukum menjelaskan bahwa pemerintahan Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik yang semakin maju. Penanggulangan kebakaran hutan sangat penting dilakukan disetiap daerah maupun pemerintahan pusat. Pemerintahan Provinsi Sumsel dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan sebagai alat pendukung suatu daerah, pemerintahan memiliki arti sempit dan luas. Pemerintahan daerah dan DPRD Provinsi saling berkerja sama dalam melaksanakan kebijakan demi tercapainya tertib pemerintahan di daerah.

---

<sup>45</sup> Data laporan BPBD setiap tahun

### **BAB III**

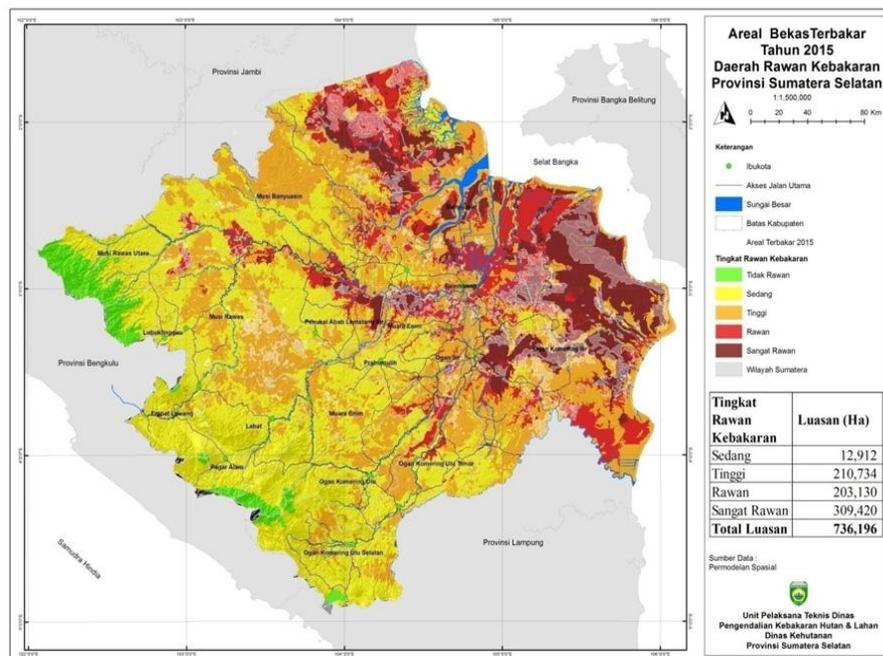
#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan tentang kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan serta bentuk strategi kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Dalam menganalisis ataupun menggambarkan tentang kebijakan politik yang diangkat menjadi materi utama Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Kebijakan Politik oleh Robert D. Behn sebagai alat menganalisis, dengan demikian akan terjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah.

Kedua masalah tersebut akan peneliti uraikan satu persatu sehingga peneliti akan menggambarkan rumusan masalah yang pertama yaitu kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan dan masalah kedua yaitu bentuk strategi kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

## A. Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan

Pada bagian ini akan mendeskripsikan temuan yang diperoleh di lapangan dilengkapi dengan analisis terhadap temuan tersebut dan akan peneliti kaitkan ke teori yang peneliti gunakan yaitu teori Robert D. Behn menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan bagaimana sikap dan peran pemerintah dengan lembaga serta hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana kebijakan yang lebih menekankan proses yang akan dilakukannya dapat kita lihat dari apa saja kebijakan politik yang dilakukan dari kedua gubernur. Dalam periode kepemimpinan Gubernur di Sumatera Selatan menerapkan sebuah kebijakan politiknya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Berikut gambar peta tingkat rawan areal terbakar tahun 2015:



**Gambar 3.1. Peta Tingkat rawan areal terbakar tahun 2015**  
**Peta: Dinas Kehutanan Sumsel**

**Tabel 3.1 Luas Kebakaran Hutan di Sumatera Selatan (Ha)**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luasnya	646.298	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798,00	894,00

Sumber : Sipongi.menlhk.go.id

### **1. Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan**

Ada beberapa kebijakan politik yang dilakukan Gubernur Alex Noerdin dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan dalam berbagai upayanya yaitu: melaksanakan rapat *kordinasi* di tingkat Provinsi, menetapkan keadaan status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, membentuk Posko Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menyebarluaskan “*Maklumat*” tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar serta ancaman hukuman kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, pendirian posko pemadaman dini, didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan, oleh personil gabungan, maupun posko pemadaman oleh perusahaan hutan dan perkebunan, juga dilaksanakan patroli terpadu di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.<sup>46</sup>

Untuk menjawab persoalan bagaimana kebijakan politik yang dilakukan Gubernur Alex Noerdin dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan peneliti telah melakukan wawancara kepada 4 orang informan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang akan peneliti

---

<sup>46</sup> Data laporan pertahun BPBD Sumsel

deskripsikan, menurut Bapak Syafrul Yunardy, S. Hut., M.E, Ketua Umum

Dinas Kehutanan Sumatera Selatan mengemukakan bahwa :

“Kebakaran itu terjadi 99% disebabkan oleh ulah manusia yang setiap tahun melihat kondisi alam yang kering maka mereka akan mulai membakar. Itulah yang memang perlu dicarikan solusi bagaimana membuka lahan tanpa bakar. Periode Alex Noerdin sudah dibuat kebijakan pengendalian Karhutla dalam pemadaman secepat mungkin karena adanya event-event nasional sea games”.

Berdasarkan dari yang peneliti lihat jawaban oleh ketua dinas kehutanan, disini beliau menyampaikan bahwasanya dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masa Alex Noerdin lebih mengutamakan pemadaman secepat mungkin ketika ada api sekecil apapun sesuai yang diatur dalam Perda No. 8 tahun 2016.

Berikut ini berita dari akurat.co bahwa Alex Noerdin fokus dalam event sea games:



AKURAT.CO Baru-baru ini terjadi kebakaran lahan di dekat kawasan Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (21/8). Dekat lokasi berlangsungnya kompetisi 10 cabang olahraga Asian Games 2018.

Kebakaran terjadi tepat di belakang Bank Sumsel Babel, sebelah timur sebelum Athlete Village JSC, Palembang. Turut memantau proses pemadaman, Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin mengatakan kebakaran kemungkinan terjadi karena cuaca yang sangat terik.

"Dalam cuaca yang sangat terik ini, di puncak kemarau, rumput-rumput seperti ini panas dan angin kuat bergesekan bisa saja timbul percikan api," ujar Alex saat memantau proses pemadaman api, Selasa (21/8).

"Apalagi kalau ada yang ceroboh membuang puntung rokok, itu bisa menyalakan api. Ini di luar kawasan Jakabaring, tapi kita harus padamkan. Khusus ini kita prioritaskan, dalam waktu 15 menit regu pemadam sudah mulai bekerja. Bukan datang ya."

Alex memperkirakan api dapat langsung dipadamkan dalam kurun waktu kurang dari 35 menit. Terlebih ada setidaknya 10 mobil pemadam kebakaran dan dua unit helikopter yang diturunkan untuk membantu proses pemadaman api.

"Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kita sudah terlatih untuk ini. Petugas juga sudah bersiaga untuk ini," Alex menambahkan. []

**Gambar 3.2 Peran Alex Noerdin meninjau pemadaman api sekitar JSC**  
**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Dari gambar 3.2 Peran Alex Noerdin dalam menanggulangi karhutla sudah lebih baik daripada tahun 2015 yang sangat parah.

"Keberhasilan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun lalu diharapkan dapat dilanjutkan sehingga provinsi ini benar-benar bisa terbebas dari bencana kabut asap pada saat pelaksanaan Asian Games 2018," kata Alex Noerdin, di Palembang, Senin (20/2/2017). "Kebakaran hutan dan lahan pertanian/perkebunan perlu dilakukan pencegahan sejak dini sehingga masalah kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan berbagai aktivitas seperti transportasi udara dapat dihindari."

Melakukan pencegahan dini karhutla dilakukan apel kesiapsiagaan dan peralatan serta melakukan pengawasan intensif yang rawan terbakar pada musim kemarau diantaranya di Oki dan Musi Banyuasin dengan patroli baik udara maupun darat dari BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri dan masyarakat sekitar.<sup>47</sup> Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel beliau mengemukakan :

"Sebelum pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun telah melakukan kebijakan politik yang maksimal melalui kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, namun kebakaran hutan dan lahan terjadi dengan intensitas yang sangat besar, sehingga mobilisasi personil dan peralatan penanggulangan kebakaran dilakukan. Di masa Alex Noerdin intensitas lebih ditingkatkan mengingat akan ada event internasional Asian Games yang akan dilaksanakan di Palembang, selain sosialisasi, Pemerintah juga meminta bantuan BPBD untuk penyediaan helikopter yang digunakan untuk melakukan patroli kebakaran hutan dan lahan serta water bombing".

Dari penyampaian yang dilakukan yaitu setiap tahun memang sebelum masa penanggulangan, pemerintah telah melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan, namun kebakaran hutan dan lahan terjadi dengan *intensitas*

---

<sup>47</sup><https://www.wartaekonomi.co.id/read131321/alex-noerdin-minta-bpbd-sumsel-kerja-maksimal-cegah-karhutla> diakses pada 21 Oktober 2020

yang sangat besar, sehingga mobilisasi personil dan peralatan penanggulangan kebakaran dilakukan. Sebagai tim penanganan darurat lebih mengutamakan koordinasi bersama dinas-dinas terkait secara cepat, tepat dan terencana setiap tahun memang dilakukan kegiatan tersebut. Untuk melihat kebijakannya kita tidak bisa menyalahkan satu pihak dikarenakan terjadi peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya akibat kondisi kemarau yang cukup kering dan panjang. Berikut berita di lembaga BPBD :



**Gambar 3.4 Peran Alex Noerdin minta BPBD maksimal cegah Karhutla**  
**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Dari gambar 3.4 Peran Alex Noerdin dalam menanggulangi karhutla melalui pihak BPBD, instansi lainnya, perusahaan perkebunan, masyarakat, berupaya secara maksimal melakukan pencegahan sejak dini. Pengawasan hutan dan lahan daerah rawan kebakaran dilakukan dengan cara patrol udara

menggunakan helicopter dan patrol darat menurunkan petugas BPBD, maggala agni, TNI, Polri dan masyarakat sekitar. Selain itu pihaknya juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika ketahuan petugas lapangan akan diamankan dan diproses secara hukum dengan sanksi cukup berat berupa kurungan dan denda. Dinas Pertanian telah membagikan 2.725 *hand tractor* dan 729 pompa air kepada petani 17 kabupaten/kota se-Sumsel untuk membuka lahan tanpa membakar.<sup>48</sup>

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Kodam II Sriwijaya bagian pengerahan staff operasi beliau mengatakan :

“Karhutla zaman sekarang lebih massif karena beberapa faktor seperti perubahan cuaca dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Kami sebagai TNI tidak tahu kebijakan pemerintah kami hanya mendapatkan anmpasnya saja. Kami diharuskan cepat tanggap menjalankan perintah untuk segera menuju lokasi terbakar meskipun resiko yang sangat besar harus kami hadapi dikarenakan kebakaran ini cepat merambat jika saat musim kemarau panjang dan lokasi terbakar yang jauh dari jangkauan menyulitkan kami. Dikarenakan sebagian rakyat bertani dan membutuhkan lahan, Sedangkan alat berat mahal harganya maka mereka memilih cara mudah yaitu membakarnya.”<sup>49</sup>

Dari pernyataan tersebut bahwa para TNI lebih fokus melakukan pergerakan langsung ke lapangan sesuai arahan yang telah diberikan.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan DPRD ketua fraksi PDIP beliau mengatakan :

“Menurut saya kebijakan dalam Perda Sumsel masih perlu banyak revisi mengenai penanggulangan karhutla ini diutamakan koordinasi, anggaran

---

<sup>48</sup><https://www.wartaekonomi.co.id/read131321/alex-noerdin-minta-bpbd-sumsel-kerja-maksimal-cegah-karhutla> diakses pada 21 Oktober 2020

<sup>49</sup> Eko Budiarto selaku Kepala Pengerahan pasukan staf Operasi Kodam II Sriwijaya wawancara tanggal 04 Maret 2020

serta melibatkan masyarakat seperti memasukkan edukasi pelatihan untuk mendidik masyarakat perdesa membuat kelompok-kelompok sosial masyarakat karang taruna, pramuka, mahasiswa, pelajar. Berkaitan dengan anggaran yang tahun sebelumnya masih harus ditingkatkan lagi mengingat Sumsel banyak lahan gambut dan rawan terbakar. Kita tidak dapat menyalahkan sepihak ini adalah masalah bersama terutama bagi daerah yang rentan terkena dampaknya”<sup>50</sup>

Dari pernyataan tersebut bahwa diutamakan koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi terutama antara lembaga dengan masyarakat. Pemerintah daerah harus merevisi Perda Karhutla tersebut demi mencapai kebijakan yang lebih baik. Ini ampuh karena tidak hanya pemerintah tertolong, tapi juga menyadarkan semua orang jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan pertama kali di tempat sebelum terjadinya kejadian semakin parah.

## **2. Kebijakan Politik Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan**

### **Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan**

Beberapa Kebijakan Politik Herman Deru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yaitu : Pencegahan dengan pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi atau kampanye kepedulian terhadap lingkungan utamanya untuk tidak membuka lahan dengan membakar, kesiapsiagaan, memperkuat daerah khususnya desa-desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan agar dapat mengalokasikan dana bantuan desa untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maupun regulasi

---

<sup>50</sup> Susanto Azis selaku Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan wawancara tanggal 20 Maret 2020

terhadap penggunaan atau tata kelola lahan, khususnya lahan gambut.<sup>51</sup> Untuk menjawab persoalan bagaimana kebijakan politik yang dilakukan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan peneliti telah melakukan wawancara kepada 4 orang informan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang akan peneliti deskripsikan, menurut Bapak Syafrul Yunardy, S. Hut., M.E, Ketua Umum Dinas Kehutanan Sumatera Selatan mengemukakan bahwa :

“Saat ini Herman Deru fokus pada SK tim pencegahan secara terpadu nomor 757 2020 yang menjadikan pencegahan karhutla sebagai sebuah prioritas strategi dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Pola kebijakan kedua gubernur tetap mengacu ke pembentukan satgas bagaimana pengefektifannya, rakor, apel siaga, maklumat yang merupakan agenda rutin. Jika permasalahan yang terjadi sudah diberikan kebijakan yang tepat akan tetapi percuma bila pada implementasi yang tidak optimal.”<sup>52</sup>

Masa Alex Noerdin dan Herman Deru umumnya pola kebijakannya sama yaitu mengacu ke pembentukan Satgas bagaimana pengefektifannya, rapat koodinator, apel siaga, maklumat yang merupakan agenda rutin namun karena adanya event sea games di masa aat ini Herman Deru lebih berfokus pada pembentukan tim pencegahan lebih efektif secara terpadu dan pengendalian sumber titik api karena manusianya yang masih banyak bermain api. Berikut berita mengenai Gubernur Herman Deru prioritaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan :

---

<sup>51</sup> Data laporan pertahun BPBD Sumsel

<sup>52</sup> Syafrul Yunardy, S. Hut., M.E selaku Ketua Umum Dinas Kehutanan Sumatera Selatan wawancara tanggal 04 Maret 2020

### **Prioritaskan Pencegahan Karhutla di Sumsel, Herman Deru Segera Kumpulkan Bupati dan Walikota**

Haris Suprpto  
Selasa, 6 Agustus 2019



Jakarta, Sumselupdate.com – Gubernur Sumsel H Herman Deru menginstruksikan para kepala daerah dan pihak terkait di Sumsel untuk tetap waspada dan terus sigap dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini penting dilakukan agar jangan sampai kejadian kebakaran parah yang terjadi di tahun 2015 terulang kembali.

“Instruksi Presiden hari ini dalam pengendalian karhutla titik beratnya adalah di dalam pencegahan, karena tentunya di masing-masing provinsi serta kabupaten mempunyai masalah sendiri-sendiri,” ujar Herman Deru usai rapat koordinasi pengendalian karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8/2019).

**Gambar 3.3 Herman Deru prioritaskan pencegahan Karhutla di Sumsel  
Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Gambar 3.3 menunjukkan Periode Herman Deru dalam mengatasi Karhutla lebih memprioritaskan pada pencegahan dengan koordinasi antarpihak dimana kita ketahui bahwa setelah kebakaran 2015 hingga 2018 kabut asap dapat ditekan karena kebakaran luas dapat diatasi. Sejumlah program restorasi gambut seperti sekat kanal dan sumur bor sebagian dikerjakan setelah Asian Games. Tim restorasi gambut terus melakukan pemetaan daerah rawan sehingga bisa segera ditangani, beberapa kabupaten seperti OKI, OI, Banyuasin dan Oku Timur diberikan layar informasi Indeks Pencemaran Udara (ISPU).<sup>53</sup>

Jika tidak ada manusia membakar maka tidak akan terbakar hutan dan lahan gambut. Karhutla sudah menjadi tradisi kelompok tertentu sebab biayanya murah menyebabkan lahan subur. Masalahnya, pilihan tersebut

<sup>53</sup><https://www.mongabay.co.id/2019/09/19/koordinasi-kunci-awal-cegah-terjadinya-karhutla/> diakses pada 21 Oktober 2020

merusak lingkungan, berdampak pada kesehatan, perubahan iklim, juga ekonomi, sehingga perlu dicegah atau dihilangkan tradisi tersebut. Ini dilakukan setiap tahun tanpa harus diperintah atau adanya event. Upaya ini mungkin butuh waktu lama tapi itulah cara utama kita menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel beliau mengemukakan :

“Di masa Herman Deru terjadi peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dikarenakan kondisi kemarau yang cukup kering dan panjang hingga sampai dengan akhir bulan November 2019, selain karena dipicu unsur kesengajaan pembakaran baik sengaja ataupun karena kelalaian manusia. Untuk faktor alam tentunya ini juga harus menjadi perhatian dan penelitian mengingat ada beberapa kasus terjadinya kebakaran pada lokasi yang memang tidak ada akses untuk aktifitas manusia atau jauh dari jangkauan manusia. Kami sebagai tim penanganan darurat lebih mengutamakan koordinasi bersama dinas-dinas terkait secara cepat, tepat dan terencana.”<sup>54</sup>

Dari penyampaian yang dilakukan yaitu setiap tahun memang sebelum masa penanggulangan, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, namun kebakaran hutan dan lahan terjadi dengan *intensitas* yang sangat besar, sehingga mobilisasi personil dan peralatan penanggulangan kebakaran dilakukan. Kami sebagai tim penanganan darurat lebih mengutamakan koordinasi bersama dinas-dinas terkait secara cepat, tepat dan terencana setiap tahun memang dilakukan kegiatan tersebut. Untuk melihat kebijakannya kita tidak bisa menyalahkan satu pihak dikarenakan terjadi peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan dibandingkan beberapa tahun

---

<sup>54</sup> Anshori selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel wawancara tanggal 10 Maret 2020

sebelumnya akibat kondisi kemarau yang cukup kering dan panjang. Berikut berita Herman Deru serius atasi Karhutla di Sumsel :



**Gambar 3.5 Herman Deru serius atasi Karhutla di Sumsel  
Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Gambar 3.3 menunjukkan Herman Deru serius dalam mengatasi Karhutla dengan berkoordinasi dengan TNI/Polri dan BNPB, serta kepala daerah di 17 kabupaten/kota di sumsel. Herman Deru telah menetapkan siaga darurat asap karhutla. Misalnya, melakukan kampanye pencegahan karhutla dengan melibatkan semua instansi meliputi BPBD, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian, anggota TNI/Polri, Manggala Agni hingga tingkat desa. April 2019 Gubernur telah menerbitkan SK Satgas Karhutla Sumsel dengan menunjuk Danrem 044 Gapo dan Kepala BPBD sumsel sebagai Wadan Satgas dibantu dengan sub Satgas Udara, Danlanud, Satas Darat, Satas Dakkum, Satgas Sosialisasi dan doa dari Pemprov. Keseriusan pemprov juga ditindaklanjuti dengan membuat maklumat larangan membakar bersama antara Gubernur,

Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel, membentuk posko-posko pencegahan kebakaran di desa rawan. Gubernur sudah melakukan patroli menggunakan helikopter untuk memantau karhutla diantaranya ke Muba, Banyuasin, OKI, OI, OKU dan Kabupaten Pali. Menggelar shalat istisqa serentak di Sumsel juga dukungan penuh dari BNPB berupa pemadaman secara konvensional jalur darat, patroli dan pemadaman jalur udara (*Water Bombing*) anggota TNI sebanyak 1.000 personel, Polri 205 personel, 102 dari BPBD dan sisanya 205 orang melibatkan unsur masyarakat di desa rawan karhutla.<sup>55</sup>

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Kodam II Sriwijaya bagian pengerahan staff operasi beliau mengatakan :

“Karhutla zaman sekarang lebih massif karena beberapa faktor seperti perubahan cuaca dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Kami sebagai TNI tidak tahu kebijakan pemerintah kami hanya mendapatkan anmpasnya saja. Kami diharuskan cepat tanggap menjalankan perintah untuk segera menuju lokasi terbakar meskipun resiko yang sangat besar harus kami hadapi dikarenakan kebakaran ini cepat merambat jika saat musim kemarau panjang dan lokasi terbakar yang jauh dari jangkauan menyulitkan kami. Dikarenakan sebagian rakyat bertani dan membutuhkan lahan, Sedangkan alat berat mahal harganya maka mereka memilih cara mudah yaitu membakarnya.”<sup>56</sup>

Dari pernyataan tersebut bahwa para TNI lebih fokus melakukan pergerakan langsung ke lapangan sesuai arahan yang telah diberikan.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan DPRD ketua fraksi PDIP beliau mengatakan :

“Menurut saya kebijakan dalam Perda Sumsel masih perlu banyak revisi mengenai penanggulangan karhutla ini diutamakan koordinasi, anggaran

---

<sup>55</sup><https://palembang.kompas.com/read/2019/09/15/22203241/gubernur-sumsel-serius-atasi-karhutla> diakses pada 21 Oktober 2020

<sup>56</sup> Eko Budiarto selaku Kepala Pengerahan pasukan staf Operasi Kodam II Sriwijaya wawancara tanggal 04 Maret 2020

serta melibatkan masyarakat seperti memasukkan edukasi pelatihan untuk mendidik masyarakat perdesa membuat kelompok-kelompok sosial masyarakat karang taruna, pramuka, mahasiswa, pelajar. Berkaitan dengan anggaran yang tahun sebelumnya masih harus ditingkatkan lagi mengingat Sumsel banyak lahan gambut dan rawan terbakar. Kita tidak dapat menyalahkan sepihak ini adalah masalah bersama terutama bagi daerah yang rentan terkena dampaknya.”<sup>57</sup>

Dari pernyataan tersebut bahwa diutamakan koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi terutama antara lembaga dengan masyarakat. Pemerintah daerah harus merevisi Perda Karhutla tersebut demi mencapai kebijakan yang lebih baik. Ini ampuh karena tidak hanya pemerintah tertolong, tapi juga menyadarkan semua orang jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan pertama kali di tempat sebelum terjadinya kejadian semakin parah.

Dari penjelasan wawancara yang sudah peneliti dilakukan yang berhubungan dengan kebijakan politik yang dilakukan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan ada 4 (empat) orang informan, yang disampaikan oleh Syafrul Yunardy, Anshori, Eko Budiarto, dan Susanto Azis.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan politik dari pemerintah Secara garis besar, banyak aspek penyelenggaraan penanggulangan ataupun pencegahan yang tidak dapat dinilai karena tidak ada data yang cukup representatif untuk menilainya. Di bidang pencegahan, Pemerintah Sumsel fokus pada sosialisasi dan pembinaan. Di bidang pemulihan, Pemerintah Sumsel telah melakukan langkah yang sedikit lebih maju dengan cara bekerja

---

<sup>57</sup> Susanto Azis selaku Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan wawancara tanggal 20 Maret 2020

sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk pemulihan lahan gambut. Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, data yang disediakan tidak transparan.

## **B. Bentuk & Strategi Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan**

Pada bagian ini akan mendeskripsikan bentuk dan strategi kebijakan politik gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Setelah diketahui bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan bagaimana sikap dan peran pemerintah dengan lembaga serta hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana kebijakan yang lebih menekankan proses yang akan dilakukannya dapat kita lihat dari apa saja yang telah dilakukan dari kedua gubernur. Dalam periode kepemimpinan Gubernur di Sumatera Selatan menerapkan sebuah kebijakan politiknya terkhusus dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.

Bentuk kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dalam Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan berupa Peraturan daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan lahan dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada keseimbangan dan kelestarian serta mengamankan fungsi serta manfaat dari hutan tersebut.

Kemudian Pasal 2 mencakup 4 ruang lingkup yakni meliputi upaya pencegahan, upaya penanggulangan, upaya penanganan dan upaya pengawasan.

Sedangkan Bentuk kebijakan politik Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dimana telah adanya Perda maka gubernur saat ini Herman Deru mewacanakan terbitnya peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur larangan membakar hutan dan lahan. Peraturan ini pula akan mengatur apa yang menjadi kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam kebutuhan membukalahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian. Ia sedang mempersiapkan menelaah sebagaimana pembolehan pembukaan lahan yang diatur dalam peraturan yang ada selama ini. Pergub akan lebih rinci mengatur pembukaan lahan yang sesuai. Sarana prasarana yang dipersiapkan sebelum membuka lahan harus dicegah semaksimal mungkin. Lebih meningkatkan anggaran untuk pemadaman. Berikut ini akan dijelaskan strategi kebijakan politik kedua gubernur dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan :

#### **1. Strategi Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan**

Strategi merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsi satuan unit kerja. Strategi kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Peraturan sistem pengendalian Karhutla
- b. Menyiapkan anggaran pada Dinas kehutanan sebesar 3 miliar dan dari Bappeda sebanyak 10 miliar
- c. Mewajibkan pelaku usaha pertanian memiliki SDM, Saranan dan prasarana, dan melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- d. Meningkatkan kesadaran, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan aparatur
- e. Melaporkan hasil dalkarhutla kepada menkopolhukam
- f. Mengotimalkan peran dan fungsi BPBD
- g. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah kabupaten
- h. Melakukan koordinasi penanggulangan Karhutla lintas kab/kota
- i. Mengalokasikan dalam APBD dan Memenuhi SDM Dalkarhutla
- j. Menyiapkan sarana prasarana Dalkarhutla
- k. Memberikan informasi Karhutla dan dampaknya pada masyarakat
- l. Melakukan deteksi dini pencegahan Karhutla dan Melakukan peringatan dini pencegahan Karhutla
- m. Melakukan pengamatan lapangan dari hasil deteksi dini<sup>58</sup>

## **2. Strategi Kebijakan Politik Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan**

Strategi kebijakan politik Gubernur Herman Deru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Diolah peneliti berdasarkan data dari laporan hasil penilaian kepatuhan Karhutla Daerah Sumsel tim peneliti Indonesian Center for Environmental Law (2015-2017)

- a. Siapkan anggaran 37 miliar untuk pencegahan karhutla
- b. Fokus membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla
- c. Sosialisasi ke desa-desa yang rawan terjadi karhutla, Melakukan patroli dini, Memberikan bimbingan teknis kepada Masyarakat Peduli Api, serta Mengaktifkan dan melibatkan kelompok masyarakat dan desa-desa peduli asap.
- d. Instruksi ke bupati/walikota daerah untuk evaluasi izin perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan
- e. Perusahaan harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban terkait karhutla di area Konsesi
- f. Mengalokasikan dana intensif sebesar 4 miliar dari sisa dana tak terduga untuk satuan Tugas Pencegahan Karhutla<sup>59</sup>

Dari penjelasan strategi kebijakan politik kedua gubernur diatas dapat dipahami bahwa kebijakan politik yang dilakukan dalam berbagai strategi yang digunakan dari pemerintah dijelaskan secara garis besarnya saja, karena banyak aspek penyelenggaraan penanggulangan ataupun pencegahan yang tidak dapat dinilai karena tidak ada data yang cukup representatif untuk menilainya tetapi secara keseluruhan upaya dari kedua gubernur telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan penelitian peneliti.

Strategi Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan sudah berjalan cukup baik dan optimal dimana kita diketahui bahwa masa

---

<sup>59</sup> Pantau komitmen tuntutan penanganan Karhutla dan hasil wawancara dengan lembaga tim penanganan Karhutla

kepemimpinan Alex Noerdin yang sudah dua periode sudah banyak program yang dibuat dengan berbagai lembaga. Gubernur Alex Noerdin lebih berfokus pada pengendalian Karhutla dengan menyusun Peraturan Daerah dalam pengendalian Karhutla. Kemudian saat kepemimpinan Gubernur Herman Deru mewacanakan peraturan Gubernur yang mengatur pelarangan membakar hutan dan lahan. Kemudian dari berbagai lembaga berkoordinasi melanjutkan program yang telah di buat dengan kegiatan utama lebih berfokus membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla selanjutnya mengevaluasi program yang ada serta menambah dana dalam mengatasi Karhutla.

Di bidang pencegahan ini, Pemerintah Sumsel fokus pada sosialisasi dan pembinaan. Di bidang pemulihan, Pemerintah Sumsel telah melakukan langkah yang sedikit lebih maju dengan cara bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk pemulihan lahan gambut. Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, data yang disediakan tidak transparan.

Namun terkait kebijakan politik dalam upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini, peneliti menemukan masalah pada aspek keterbukaan dan manajemen informasi yang menjadi salah satu faktor penghambat salah satu faktor penghambat upaya pengendalian Karhutla. Dokumen yang seharusnya wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemerintah Provinsi Sumsel tidak tersedia dalam media yang mudah diakses masyarakat.<sup>60</sup> Misalnya informasi tentang laporan

---

<sup>60</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

kinerja Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah Sumsel, dan dokumen perencanaan kinerja, terlebih dokumen perencanaan khusus terkait Karhutla.

Dalam dua kepemimpinan Gubernur di Sumatera Selatan menerapkan kebijakan politik yang sudah sesuai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun tak dapat dipungkiri memang ada potensi pemacu kebakaran yaitu manusianya yg buat api atau alamnya apabila musim kering lebih panjang maka akan mudah terjadi kebakaran. Sudah ada fatwa juga bahwa haram hukumnya membakar hutan yang dampaknya merugikan orang banyak, merusak, tidak hanya masyarakat terkena asapnya, tanaman dan hewan juga banyak yang mati.

Penelitian ini sebagai *preliminary findings* (temuan awalan) untuk melakukan evaluasi kualitas kebijakan politik pemerintah. Terlepas dari sifatnya sebagai temuan awal, penelitian ini akan memberikan gambaran pemerintah yang diteliti terhadap kewajibannya di bidang penanggulangan Karhutla.

Berdasarkan temuan penelitian ini dihasilkan rekomendasi yang harapannya dapat bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat sipil secara umum dalam mengoptimalkan pengawasan sosial terhadap pemerintah maupun pelaku usaha. Hal yang ini dianggap penting mengingat pengendalian Karhutla merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setidaknya diamanatkan UU 32/2009, terhadap mana masyarakat diberikan hak untuk berperan serta. Selain itu, penelitian ini akan memunculkan kualitas kebijakan politik pemerintah sebagai salah satu variabel yang relevan untuk mengukur kontribusinya terhadap penurunan titik panas dan/atau titik api akibat Karhutla.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan Kebijakan Politik Mantan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan sudah berjalan cukup baik dan optimal. Dimana kita diketahui bahwa masa kepemimpinan Alex Noerdin yang sudah menjabat dua periode maka sudah banyak program yang di buat dengan berbagai lembaga. Gubernur Alex Noerdin lebih berfokus pada pengendalian Karhutla dengan menyusun Peraturan Gubernur dalam pengendalian Karhutla. Kemudian saat kepemimpinan Gubernur Herman Gubernur Herman Deru mewacanakan peraturan Gubernur yang mengatur pelarangan membakar hutan dan lahan. Kemudian dari berbagai lembaga berkoordinasi melanjutkan program yang telah di buat dengan kegiatan utama lebih berfokus membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla selanjutnya mengevaluasi program yang ada serta menambah dana dalam mengatasi Karhutla.

2. Dalam dua kepemimpinan Gubernur di Sumatera Selatan menerapkan strategi kebijakan politik yang sudah sesuai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun tak dapat dipungkiri memang ada potensi pemacu kebakaran yaitu manusia yang membuat api dalam membuka lahan menggunakan cara yang mudah yaitu dengan cara membakar atau alam dimana terjadi perubahan cuaca apabila musim kering lebih panjang maka akan mudah terjadi kebakaran. Sudah ada fatwa juga bahwa haram hukumnya membakar hutan yang dampaknya merugikan orang banyak, merusak, tidak hanya masyarakat terkena asapnya, tanaman dan hewan juga banyak yang mati dan rusak.

## **B. SARAN**

Hasil penelitian diatas, saran-saran yang dapat peneliti berikan lewat penelitian antara lain:

1. Pemerintah diharapkan bisa mempertahankan penanggulangan karhutla yang sudah membaik serta diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi bencana karhutla. Serta meningkatkan peran legislatif dalam melakukan pengawasan, legislasi, dan bugdeting dalam tindakan pencegahan dan pengendalian karhutla di Sumatera Selatan.
2. Mengingat kebakaran hutan merupakan masalah lintas sektor dan terkait banyak aktor semestinya bukan hanya aktor pemerintah yang dilibatkan dalam Satgas pengendalian, namun juga masyarakat sipil, akademisi

maupun masyarakat serta pengusaha. Mekanisme koordinasi yang efektif masih perlu dikaji mulai dari pusat, provinsi hingga tingkat tapak (desa).

3. Perlunya perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan yang dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk mendukung pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla.
4. Skripsi ini memiliki keterbatasan baik materi ataupun tulisan, penulis sangat terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dari tulisan ini. Penulis mengharapkan penelitian dan kajian mengenai Kebijakan Politik harus dikembangkan dengan baik lagi, sebab sampai saat ini masih banyak hubungan atau kebijakan politik di Sumatera Selatan terus mengalami perkembangan baik mengenai konflik atau munculnya kebijakan baru serta pergantian masa kepemimpinan seorang Gubernur juga bisa mendasari perkembangan penelitian yang berbeda satu dengan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anderson, James E. 1984. *"Public Policy Making"*, (New York: Holt, Rinehart and Winston)
- Arifin, Prof. Dr. Anwar. (2014). *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Behn, Robert D. (2015). *Policy Analysis and Policy Politics*, Universitas of California Press.
- Budiardjo, Mariam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fischer, Frank dkk. (2007). *Handbook Of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*, CRC Press.
- Goodnow, Frank, (1990), *PoliticsAnd Administration:A Study in Government*, New York, the Macmillan Company: London Macmillan & co.ltd
- H.S, Salim. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Martono, Nanang. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pres
- Siregar, I. Januar. (2010). *Dampak Kebakaran dan Hutan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak*. Depok: Universitas Teknik.

Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,

Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramlan. (1991). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke*

*Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta:

Bumi Aksara,

## **B. JURNAL**

Agung Setiawan (2018). *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan*

*Lahan di Indonesia (Agung Setiawan) baru*.

Anih Sri Suryani (2012). *Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran*

*Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia*

Desri Hunawan (2016). *Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan*

*(KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan*

*Pintas*:

Herman Daryono, *Potensi, Pemasalahan dan kebijakan yang diperlukan*

*dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara*

*lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 6. No. 2, Agustus

2009.

Kushartati Budiningsih (2017). *Implementasi Kebijakan Pengendalian*

*Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan*

### C. INTERNET

Tiribunnews, <https://www.tribunnews.com/regional/2013/11/07/alex-noerdin-ishak-mekki-resmi-pimpin-sumsel> Alex Noerdin : Putra Daerah yang Menjadi Pemimpin Sumsel, diakses pada 4 Januari 2019.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read131321/alex-noerdin-minta-bpbd-sumsel-kerja-maksimal-cegah-karhutla> diakses pada 21 Oktober 2020

<https://www.mongabay.co.id/2019/09/19/koordinasi-kunci-awal-cegah-terjadinya-karhutla/> diakses pada 21 Oktober 2020

<https://palembang.kompas.com/read/2019/09/15/22203241/gubernur-sumsel-serius-atasi-karhutla> diakses pada 21 Oktober 2020

Mohammad Atik Fajardin, “Perubahan Tata Kelola Hutan di Era Jokowi diapresiasiFAO”,<https://nasional.sindonews.com/read/1323326/15/perubahan-tata-kelola-hutan-di-era-jokowidiapresiasi-fao-1532009703> diakses pada 14 Oktober 2020

Sehari 353 Titik Api di Sumsel, Terbanyak sepanjang 2019,

<https://m.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada 10 Oktober 2019

Alex Noerdin dan kisah ‘Pukulan telak’ Kebakaran hutan,

<https://m.ccnindonesia.com/nasional>, diakses tanggal 10 Oktober 2019

<https://mediaindonesia.com/read/detail/260024-gubernur-sumsel-siap-mundur-jika-gagal-tanggulangi-karhutla> diakses tanggal 10 Oktober 2019

## **DOKUMENTASI**

Wawancara peneliti dengan apak Syafrul Yunardy, S. Hut., M.E, selaku Ketua  
Umum Dinas Kehutanan Sumatera Selatan



Wawancara peneliti dengan Anshori selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat  
BPBD Sumsel



Wawancara peneliti dengan Eko Budiarto selaku Kepala Pengerahan pasukan staf  
Operasi Kodam II Sriwijaya



Wawancara peneliti dengan Susanto Azis selaku Ketua Komisi V DPRD Sumatera  
Selatan





# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B.191 /Un.09/III/PP.01/01/2020  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi
  - Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
  - Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **an: Sahuda, Tanggal 23 Januari 2020**
- MENGINGAT :**
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
  - Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
  - Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
  - Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
  - Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Kun Budiarto, M.Si	197612072007011010	Pembimbing I
Erik Darmawan, M.HI	0217057402	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	: Sahuda
N I M	: 1657020159
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Perbandingan Kebijakan Politik Mantan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT 27 Januari 2020 s/d 27 Januari 2021

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

### Tembusan:

- Rektor;
- Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
- Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
- Ketua Prodi Ilmu Politik
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Asip

Palembang, 27 Januari 2020

Dekan,



Prof. Dr. izomiddin, MA  
NIP.196206201988031001

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : SAHUDA  
NIM : 1657020159  
Program Studi : ILMU POLITIK  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Judul Skripsi : Perbandingan Kebijakan politik Mantan Gubernur  
Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Peningkatan  
Kebijakan Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan.  
Pembimbing I : Dr. Eun Budianto, M.Si  
Pembimbing II : Ent Damawan, M.Hi

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	5/12/2019	Revisi Bab I	[Signature]
2.	23/01/2020	Lanjut Bab II	[Signature]
3.	15/02/2020	Revisi Bab II	[Signature]
4.	2/03/2020	Lanjut Bab III	[Signature]
5.	7/03/2020	Perbaiki Bab III	[Signature]
6.	6/11/2020	Lanjut Bab IV	[Signature]
7.	14/11/2020	Revisi Bab IV	[Signature]
8.	30/11/2020	Acc Bab IV	[Signature]
9.	1/12/2020	untuk ditranskrip ujian skripsi	[Signature]

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SAHUDA  
 NIM : 1657020159  
 Judul : Perbandingan Kebijakan Politik Mantan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan  
 Dosen Pembimbing : ERIK DARMAWAN S.IP

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-10-26 14:50:04	Assalamualaikum wr.wb pak., Mohon waktunya pak untuk mengoreksi apabila ada yang salah dalam bimbingan bab 3 saya. Terimakasih sebelumnya pak. Wassalamu'alaikum wr.wb.	silakan dimulai dari bab 1 dulu
2	2020-10-26 17:54:27	BAB I	perbaiki dulu cara penulisan, sesuaikan dengan pedoman fisip
3	2020-11-02 15:36:07	BAB I	Pada bagian akhir penulisan kerangka teori tambahkan uraian cara penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini pada bagian wawancara dan dokumentasi tambahkan pihak-pihak yg diwawancarai dan apa garis besar hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara dalam bagian dokumentasi jelaskan data apa yg telah di dokumentasikan. Setelah perbaiki bab 1 silakan upload Bab 1 hasil perbaikan dan bab 2
4	2020-11-05 07:46:04	BAB I DAN BAB II	silakan lanjutkan bab berikutnya
5	2020-11-05 12:10:28	BAB III	Agar penelitian ini lebih berbobot dan aspek analisisnya lebih terlihat, maka tambahkan satu bagian lagi : C. Perbandingan Upaya DALKARHUTLA di Sumsel antara Gubernur Alex Noerdin dan Herman Deru. lalu berikan analisa yg sifatnya membandingkan
6	2020-11-13 10:21:08	BAB III	silakan lanjutkan Bab berikutnya
7	2020-11-18 20:24:39	BAB IV	Satukan keseluruhan Bab menjadi skripsi, sesuai pedoman penulisan

8	2020-11-23 10:42:41	FULL BAB	Silakan di print keseluruhan bagian skripsinya untuk dibaca dan dikoreksi tahap akhir dengan Pembimbing 2
---	------------------------	----------	---

2020/11/24

9. 2020-11-24 : Koreksi Keseluruhan. Perbaiki abstrak, Metodologi, Kesimpulan dan Penulisan.
10. 2020-11-24 : Print Seluruh bagian skripsi

- 
- Telah selesai bimbingan keseluruhan bagian skripsi
  - Silakan dilanjutkan bimbingan dengan pembimbing I
  - Pembimbing I Bapak Dr. Eva Budianta, M.S.

25/11/2020

pembimbing II

*Erika*

Erika Samudra, M.Ki





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.2243/Un.09/VIII/TL.01/12/2019  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Mohon Izin Pra Penelitian

18 Desember 2019

Kepada Yth  
Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sumatera Selatan  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

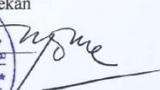
Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Sahuda  
NIM : 1657020159  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan lahan (Karhutla)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Pra Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Dekan  
  
Prof. Dr. Izomiddin, MA  
NIP.196206201988031001

Tembusan  
1. Ka. Prodi Ilmu Politik  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 354668 website : [www.fisip.radenfatah.ac.id](http://www.fisip.radenfatah.ac.id)



Dipastikan Terpercaya  
dan Dapat Dipertanggungjawabkan  
**TBS**  
(Tersertifikasi dan Terakreditasi)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax. (0711) 354715  
Palembang 31129

**REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI**

Nomor: 070/ /Ban. KBP/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Palembang  
Nomor : B.2243/UN.09/VIII.TL.01/12/2019,  
Tanggal : 18 Desember 2019, Hal : Izin Penelitian.

**DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

- Nama /NIM : SAHUDA / 1657020159  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jalan Karya 3 Rt.24 Rw.06 No.1550 Palembang  
Lokasi Penelitian : 1.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan  
2.Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
3.Pangdam II Sriwijaya  
4.Kapolda Sumatera Selatan  
5.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan  
Bidang Penelitian : Informasi Kebijakan Politik (Humas)  
Jangka Waktu : 3 bulan  
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Palembang  
Tujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.  
Judul Penelitian : **Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)**  
Catatan : 1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian  
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survei diatas  
3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.  
4. Surat rekomendasi ini dapat dicabut kembali apabila pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : Januari 2020

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**H. BACHNIE RASYID, S.E., M.M., M.Si**  
Peminda Utama Muda / IV.C  
NIP. 196210221985101002

Tembusan :  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Palembang (sebagai lampiran)

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN  
SKRIPSI**

Nama : Sahuda  
NIM : 1657020159  
Program Studi : Ilmu Politik  
Tanggal Ujian Munaqosah : 07 Januari 2021  
Judul : Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan  
Gubernur Herman Deru dalam Penganggulan  
Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan

TELAH DIREVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN  
MUNAQASAH DAN TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN  
DOSEN PENGUJI II :

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yenrizal, M.Si NIP. 197401232005011004	Penguji I	
2.	Siti Anisyah, M.Si NIDN. 2012129302	Penguji II	

Palembang, 11 Januari 2021

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Kun Budianto, M.Si  
NIP. 197612072007011010

Dosen Pembimbing II,



Erik Darmawan, M.Hi.  
NIDN. 0217057402